

**Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia**

**Oleh**

**Novan Fauzi Rahman**

**13321113**

**Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**2019**

**ISLAM**  
SKRIPSI


**Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan  
Bencana**

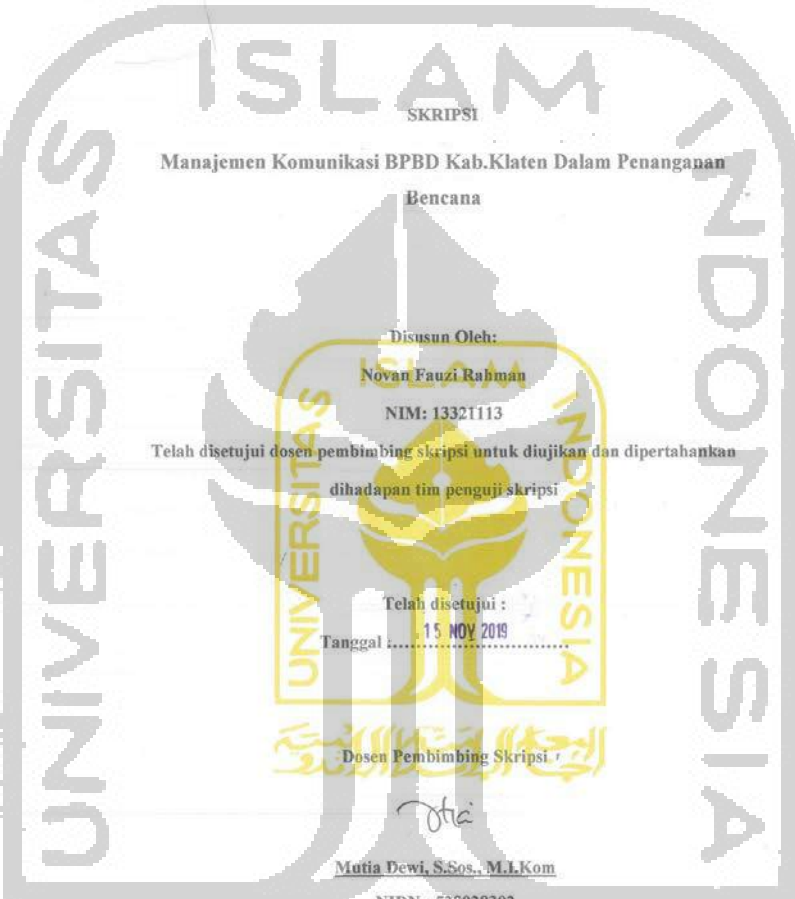
Disusun Oleh:  
**Novan Fauzi Rahman**  
NIM: 13321113

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan  
di hadapan tim penguji skripsi

Telah disetujui :  
Tanggal : 15 NOV 2019

Dosen Pembimbing Skripsi :

  
**Mutia Dewi, S.Sos., M.L.Kom**  
NIDN : 520028302



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SKRIPSI

Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana

Disusun Oleh

Novan Fauzi Rahman

NIM : 13321113

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Tanggal 15 NOV 2019

Dewan Penguji

1. Ketua : Mutia Dewi, S.Sos., M.I.Kom

NIDN : 520028302

2. Anggota : Nadia Wasta Utami, S.I.Kom., M.A.

NIDN : 0505068902

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom

NIDN : 0529098201

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Novan Fauzi Rahman

Nomor Mahasiswa : 13321113

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,

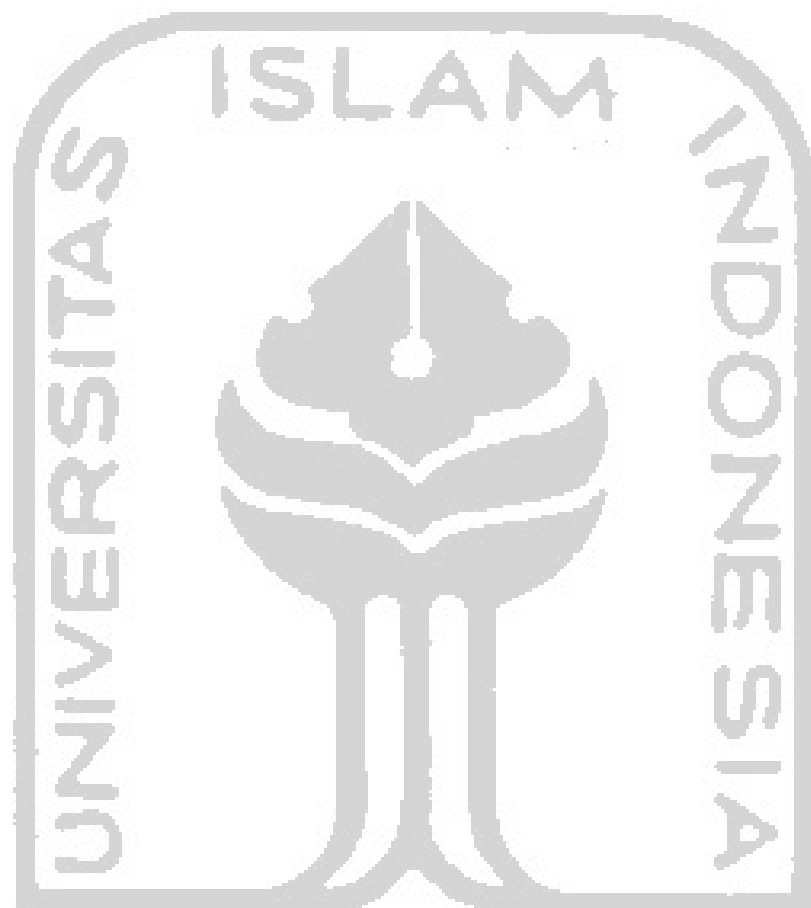
Yang

Menyatakan



**Novan Fauzi  
Rahman**

Nim.  
13321113



جامعة الإسلام في إندونيسيا

## MOTTO

للناس أنفعهم الناس خير

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”

-(Tan Malaka)-

“Knowledge without action is insanity, and action without knowledge is vanity”

Ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan

-(Iman Ghozali)-

## PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

Bapak Endang Indiat, Ibu Enung Sobariah, Bapak Hermantoro, Ibu Elly Willyawati, Saudara/i saya Amalia Nopyanti, Firman Hafidz, Rola Eka Permana, Tenny Putri, Gian Rizky Permana, Neysa, kezia. Serta para pelajar dan penekun ilmu di negeri Indonesia ini.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.,**

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-nya yang diberikan, sehingga dalam penulisan skripsi dengan judul “Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana”, dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para tabi'in yang selalu berjuang dijalan Allah SWT untuk menegakkan islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarakat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Banyak pihak telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom., selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Mutia dewi S.Sos., M.I.Kom., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, konsultasi, kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen pengajar dan staf Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua, aung, ambu, kakak-kakakku dan Keponakanku yang tercinta, yang telah memberikan dukungan material moral serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Sri Yuwana Haris Yuliyata, ST, MT selaku kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten yang telah memberikan izin penelitian hingga mengarahkan peneliti pada penelitian ini.
6. Ibu asri selaku (Staff) Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Klaten, yang telah membagikan ilmunya, membimbing penulis saat melaksanakan penelitian, serta memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Sri Yuwono Haris selaku Ka. Bid. 2. Kedaruratan dan Logistik
8. Bapak Ahmad Wahyudi selaku Ka. Bid. 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9. Seluruh sahabat dan teman teman seperjuangan di Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2013, terimakasih atas support serta kebersamaannya selama ini, semoga bisa tetap kompak dan terus menjalin silaturrahi dengan baik.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, serta dapat menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya. Penulis berharap Allah SWT, berkenan untuk membalas segala kebaikan dari seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,**

Yogyakarta,

Penulis

Novan Fauzi

Rahman

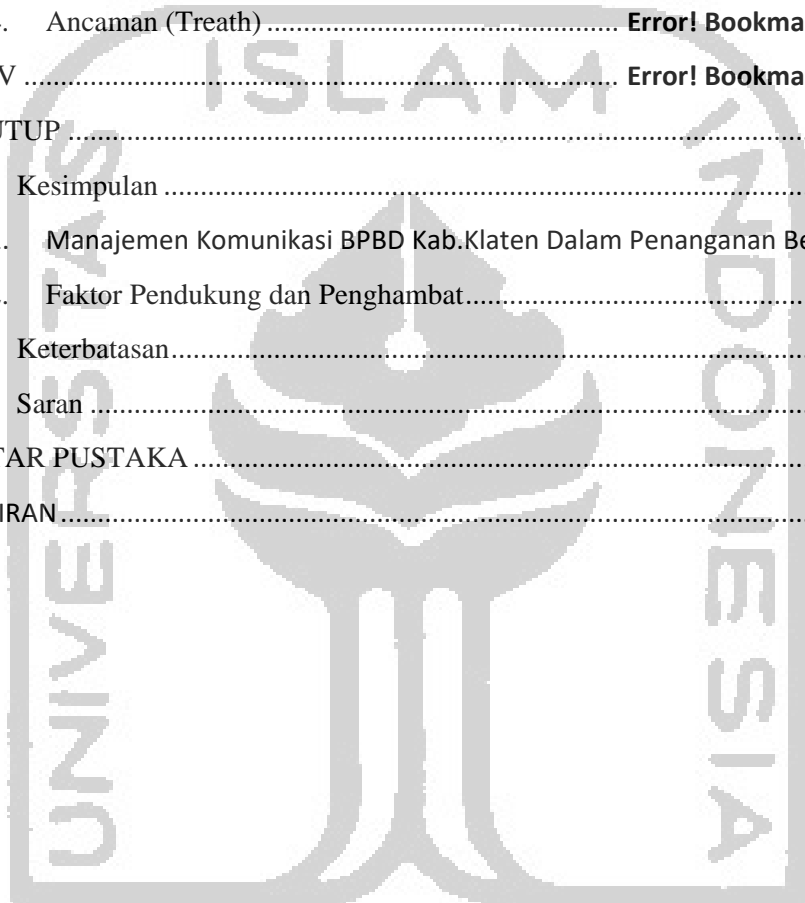


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iv
HALAMAN BUKTI MELAKUKAN PENELITIAN.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Akademis :.....	7
2. Manfaat Praktis (Masyarakat Umum).....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Penelitian Terdahulu .....	7
2. Kerangka Konsep :.....	12
F. Metode Penelitian .....	18
1. Pendekatan Penelitian .....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	18
3. Narasumber dan Informan Penelitian .....	19
4. Pengumpulan Data .....	19
5. Analisis Data.....	20

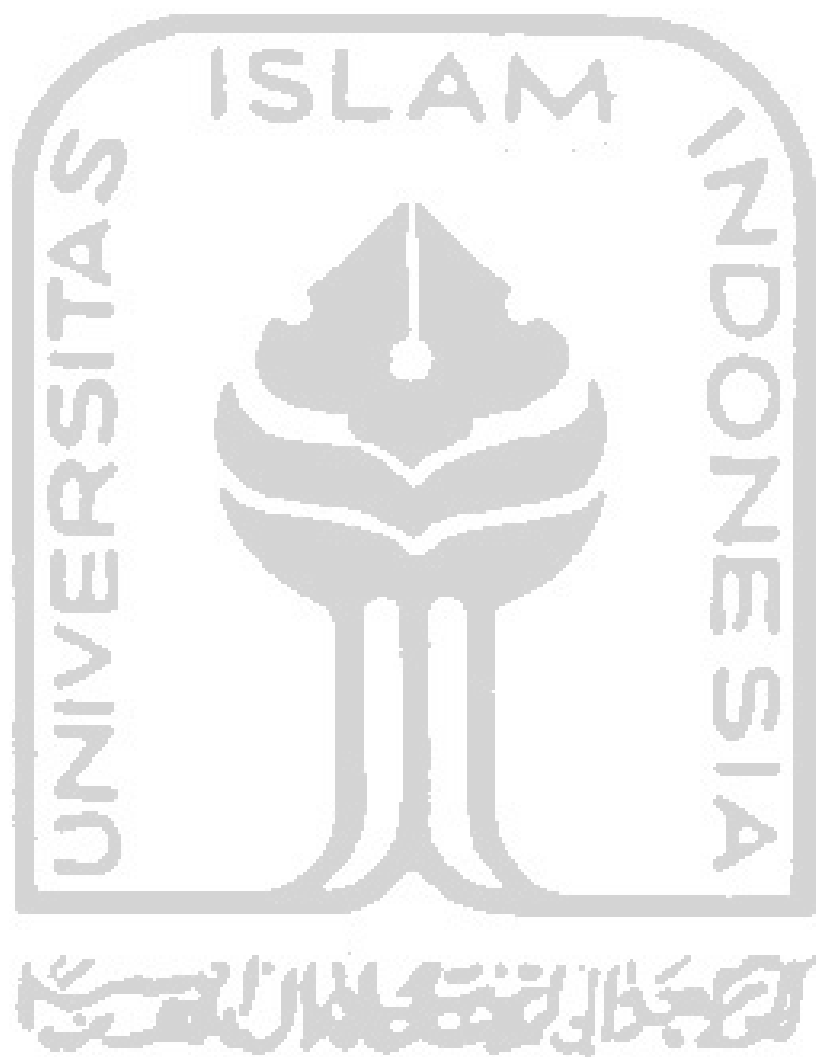
BAB II.....	22
GAMABARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	22
A. Jenis Bencana Kab.Klaten.....	22
B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Klaten .....	23
BAB III .....	27
TEMUAN PENELITIAN .....	27
A. Situasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Oleh BPBD Kab. Klaten .....	28
B. Tugas Pemerintah Dalam Penanganan Bencana .....	30
1. Kewajiban Pemerintah .....	30
2. Penanggungjawab Informasi Kebencanaan Gunung Merapi.....	33
B. Program dan Perencanaan BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana.....	38
1. Sekolah Sungai Klaten .....	38
2. Desa Tangguh .....	39
3. Desa Bersaudara.....	45
C. Komunikasi dan Implementasi BPBD Kab.Klaten dalam Penanganan Bencana .	47
1. Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOPS).....	47
2. Pertemuan Relawan.....	50
3. Pelatihan mitigasi Ke Sekolah, Puskesmas, Dunia Usaha, Dan Rumah Sakit.	52
4. Unit Layanan Disabilitas.....	53
5. Tim Reaksi Cepat.....	56
D. Evaluasi Program Penanganan Bencana BPBD Kab.Klaten .....	59
1. Hambatan dan Kritik Atas Pola Komunikasi Penanganan Bencana .....	61
BAB IV .....	64
PEMBAHASAN.....	64
A. Analisis Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana.....	64
1. Kepemimpinan BPBD Kab.Klaten dalam Pengendalian Bencana di Kabupaten Klaten.....	65
2. Perencanaan Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Pada Masa Normal dan Masa Tanggap Darurat .....	66
3. Organizing BPBD Kab.Klaten dan Kerja Sama (Kemitraan) Dalam Penanganan Bencana.....	72

4. Evaluasi dan Koordinasi BPBD Kab.Klaten dalam Penanganan Bencana.....	78
B. Analisis SWOT .....	79
1. Kekuatan (Strenght).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kelemahan (Weakness).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Peluang (Opportunity).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Ancaman (Treath).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan .....	81
1. Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana .....	81
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	83
B. Keterbatasan.....	84
C. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN.....	89



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Statistik Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir .....	2
Bagan 1.2 Kerangka Konsep Manajemen Komunikasi Bencana .....	17
Bagan 2.1 Struktur Organisasi BPBD Klaten .....	25



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kegiatan sekolah sungai.....	39
Gambar 3.2 Pelatihan Relawan Desa.....	45
Gambar 3.3 Ruang Pusdalops .....	50
Gambar 3.4 Pelatihan Mitigasi Pelajar Sekolah.....	53
Gambar 3.5 Pelatihan Relawan Disabilitas.....	56
Gambar 2.1 Spanduk Sekretariat Sekolah Sungai.....	26
Gambar 2.2 Spanduk Pelatihan Fasilitator Relawan Difabel .....	26



## ABSTRAK

**Novan Fauzi Rahman. 13321113. Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2019.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen komunikasi BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana. Selain itu manajemen komunikasi sangat penting apalagi dalam penanganan bencana khususnya Kabupaten Klaten sendiri. Sejauh ini dalam meminimalisir kerugian-kerugian yang diakibatkan bencana menjadi perhatian besar dari setiap bencana yang dialami oleh Kabupaten Klaten maupun nasional. Dan disini penulis tertarik meneliti BPBD Kab.Klaten dalam manajemen komunikasi penanganan bencana serta faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam penanganan bencana tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori komunikasi bencana (*disaster communication*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara pribadi dan terstruktur, dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil tiga narasumber yaitu (Staff) Bid. 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab.Klaten, Ka. Bid. 2 Kedaruratan dan Logistik, Ka. Bid. 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui BPBD Kab.Klaten memiliki manajemen komunikasi dengan komunikasi berbagai arah. Terlihat bahwa BPBD Kab.Klaten sebagai komando utama dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Klaten. Mereka sendiri memiliki organizing dan tugasnya masing-masing dalam penanganan bencana. Lalu dari perencanaan penanganan bencana maupun evaluasi mereka selalu mengkoordinasikan kerja sama dengan mitra relawan maupun stakeholder terkait. Evaluasi sendiri dalam kejadian bencana mereka membuatnya ke dalam sebuah laporan bernama *jitupasna* dan renaksi yang artinya rencana aksi yaitu pembangunan bertahap dari wilayah kejadian bencana. Untuk faktor pendukung dalam penanganan bencana BPBD Kab.Klaten sendiri memiliki beberapa program pembinaan masyarakat dalam penanganan bencana serta di dukung Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops). Dari segi faktor penghambat peneliti melihat bahwa media komunikasi BPPB Kab.Klaten sendiri tidak di manfaatkan secara baik contohnya adalah media sosial resmi maupun website resmi mereka banyak kekurangannya.

**Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, Komunikasi Berbagai Arah, Penanganan Bencana, BPBD Kab.Klaten**

## ABSTRACT

*Novan Fauzi Rahman. 13321113. Communication Management of BPBD Kab. Klaten in Disaster Management. Bachelor Thesis. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Indonesian Islamic University. 2019.*

*This research discusses to learn how to manage BPBD Kablaten District communication in disaster management. In addition, communication management is very important in handling the special expenditure of Klaten Regency itself. So far, in minimizing losses caused by disasters, it has become a major concern of every disaster borne by the Klaten Regency and nationally. And here the authors are interested in supporting BPBD Kab. Klaten in disaster communication management as well as any supporting and inhibiting factors in handling the disaster.*

*From these two questions, this study uses descriptive qualitative methods with disaster communication theory and data communication through observation, personal and structured interviews, and documentation. This study took three speakers, namely (Staff) Bid. 1 BPBD Prevention and Preparedness Kab. Klaten, Ka. Bids. 2 Emergency and Logistics, Ka. Bids. 3. Rehabilitation and Reconstruction.*

*Based on the results of the study, it is known BPBD Kab. Klaten has communication management with communication in various directions. It can be seen that BPBD of Klaten Regency is the main command in disaster management in Klaten Regency. They themselves have their own organizing and duties in disaster management. Then from disaster management planning and evaluation they always coordinate cooperation with volunteer partners and related stakeholders. Their own evaluation of disaster events makes it into a report called Jitupasna and its action plan, which means an action plan, namely the gradual development of the disaster area. For supporting factors in disaster management BPBD Kab. Klaten itself has several community development programs in disaster management and supported by the Operational Control Center (Pusdalops). In terms of the inhibiting factors, the researchers saw that the BPPB communication media in the Regency of Klaten itself were not utilized properly, for example, the official social media and their official websites had many shortcomings.*

**Keywords:** *Communication Management, Communication in Various Directions, Disaster Management, BPBD Kab. Klaten*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bencana alam adalah merupakan sesuatu kejadian yang sangat mengerikan di masyarakat. Bagaimana tidak bahwa bencana alam ini dapat terjadi kapanpun dan di manapun. Ada yang bilang bahwa bencana dapat terjadi ketika memang ulah masyarakatnya sendiri, namun melihat fakta di lapangan memang tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih minim dalam menjaga lingkungan, dan itu adalah salah satu dasar mengapa seringkali terjadi bencana. Selain itu di tingkat yang besar yaitu perusahaan-perusahaan di bidang tambang dan lain-lain yang di mana mereka mengandalkan sumber daya alam, selalu ada kasus di mana perusahaan tersebut mencurangi peraturan pemerintah dalam rehabilitasi lahan yang sudah digunakan (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190831001310-20-426302/tambang-ilegal-sumsel-rugikan-negara-ratusan-miliar-per-tahun>, diakses pada tanggal 18 November 2019, pukul 17.40 WIB).

Selain itu memang Indonesia memiliki segudang potensi bencana alam yang akan terjadi. Dalam 10 tahun terakhir contohnya setiap tahun selalu saja terjadi beberapa bencana yang sama kembali terjadi di Indonesia. Bahkan jumlah kejadian beberapa bencana misalnya dari tahun 2010 sampai tahun 2017 cenderung meningkat jumlah kejadiannya. Dari hal tersebut tentu menimbulkan kerugian serta korban jiwa yang mengulang setiap tahunnya di masyarakat. Mengapa hal ini selalu terulang dan kaku ketika melihat masyarakat dalam menghadapi bencana. Bisa kita liat yang beredar video viral saat terjadi detik demi detik kejadian fenomena likuifaksi saat gempa donggala banyak masyarakat yang terjebak dalam reruntuhan bangunan



(<https://tekno.tempo.co/read/1131918/video-viral-fenomena-likuifaksi-saat-gempa-donggala/full&view=ok>, diakses pada tanggal 18 November 2019, pukul 17.55). dan dibawah ini statistik tren kejadian 10 tahun terakhir di indonesia.



Bagan 1.1 Statistik Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir

(sumber: Website resmi BNPB <https://bnpb.cloud/dibi/>)

diakses tanggal 20 November 2019 pukul 18.48)

Bisa dipahami memang dalam menghadapi bencana yang tiba-tiba datang membutuhkan mental dan persiapan pengetahuan dalam menghadapi bencana. Tetapi hal ini bisa diatasi terus menerus untuk melatih dan siap dalam menghadapinya, bisa di contoh negara jepang beberapa tahun kebelakang dimana mereka dihantam tsunami yang sangat dahsyat tetapi mereka bisa mengatasi itu dan meminimalisir dampak dari tsunami tersebut <https://internasional.kompas.com/read/2018/09/06/19132921/banyak-bencana-alam-mengapa-penanganan-jepang-begitu-bagus?page=all>, diakses pada tanggal 18 November 2019, pukul 18.10).

Di dalam setiap bencana yang akan terjadi maupun sesudah, masyarakat kita sering kali mendapatkan informasi-informasi yang salah. Pada dasarnya masyarakat akan cenderung panik dalam menghadapi informasi atau isu-isu yang tidak benar. Dalam hal ini sering terjadi beredar dalam media sosial yang disalurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah bahayanya jika terjadinya informasi yang salah dan membuat masyarakat jadi panik dan mempercayainya akan sangat bahaya dengan dampaknya. Bila hal ini tidak bisa ditangani oleh masyarakat sendiri tidak akan tau dampaknya bakal bagaimana. dan disinilah peran pemerintah seharusnya menangani. Dalam menangani, pemerintah harus membuat rencana-rencana ke depannya secara terstruktur bagaimana menangani masalah manajemen komunikasi bencana ini.

Pada saat ini masyarakat kita membutuhkan edukasi bagaimana seharusnya masyarakat menghadapi bencana. Dalam hal ini mungkin salah satunya diperlukan media sebagai jembatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dalam hal penanganan bencana. Masyarakat pun perlu punya kesadaran sendiri untuk siap mengimplementasikan sosialisasi dalam komunikasi bencana. Namun disisi lain kenyataan di lapangan dan apa yang disampaikan dalam sosialisasi akan berbeda dalam penerapannya.

Sebenarnya pemerintah pusat sudah membuat status hukum undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (<https://bnpb.go.id/home/sejarah>, diakses pada tanggal 20 November 2019, pukul 19.20 WIB). Untuk tingkat daerah ada yang namanya BPBD badan penanggulangan bencana daerah, di setiap kota maupun kabupaten sudah ada beberapa memiliki badan penanggulangan bencana daerah sendiri. Salah satunya adalah kabupaten klaten. BPBD Kab.klaten ini didirikan pada tahun 2011 dengan peraturan daerah no 87 tentang organisasi dan tata kerja.

BPBD Kab.klaten ini didirikan sebagai bentuk visi yang sama dengan tujuan pemerintah kabupaten klaten yaitu menciptakan atau mewujudkan

masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Artinya adalah dimana seketika bencana datang di wilayah mereka, mereka akan siap menghadapi pra, pasca dan sesudah bencana tersebut. Hal ini akan meminimalisir dampak dari suatu bencana, karena sebelum terbentuk BPBD, Kab.Klaten ini dalam menghadapi bencana kurang terorganisir. Selain itu BPBD Kab.Klaten yang merupakan komando utama dalam penanggulangan bencana di Klaten, serta klaten terpilih sebagai penanggulangan bencana percontohan bagi nasional oleh BNPB karena wilayah kabupaten klaten memiliki potensi berbagai jenis bencana yang tergolong lengkap di indonesia ( <https://jogja.tribunnews.com/2016/11/13/klaten-jadi-percontohan-pengurangan-resiko-bencana>, diakses pada tanggal 20 November 2019, pukul 19.47 WIB).

Dalam penanganan bencana, di semua badan pemerintah seperti BNPB atau organisasi yang mempunyai kepentingan dalam penanganan bencana, mereka tentu memiliki yang namanya manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan suatu proses dimana suatu tim akan membuat langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam penanganan bencana. Seperti menganalisis, membuat daftar kerja para timnya, logistik, dll, yang berhubungan langsung dengan penanganan bencana. Hal ini memang diperlukan sebagai dasar yang harus diperhatikan, sebab kalau tidak mempunyai dasar ini mungkin tidak akan jelas apa yang mau jadi penanganan bencana.

Di samping lain dalam organisasi dibutuhkan sebuah komunikasi, yang dimana disetiap kegiatan dalam penanganan bencana dibutuhkan adanya manajemen komunikasi. komunikasi dan informasi yang disampaikan oleh pimpinan dan diteruskan kebawahnya dimengerti, dibutuhkan adanya pola komunikasi, Pola komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Ini menunjukkan bahwa dari apa yang direncanakan sebuah organisasi harus jelas dalam komunikasi organisasi.

Komunikasi dan sebagai kunci segala sesuatu permasalahan harus diatasi dengan komunikasi. Tanpa komunikasi yang benar dalam berkaitan dengan penanganan bencana, akan sangat sulit dalam menyelesaikan penanganan bencana tersebut. Di komunikasi sendiri mempunyai prinsip, menurut Seiler (1998) dalam buku komunikasi organisasi yang ditulis Muhammad (2005:19) ada empat prinsip dalam komunikasi yaitu: suatu proses, suatu sistematis, interaksi dan transaksi. Menerangkan bahwa setiap komunikasi yang dikeluarkan akan mendapat suatu proses, dan di proses ini akan menghasilkan komunikasi yang dimaksudkan atau tidak dimaksudkan.

Bila di analogikan dalam penanganan bencana contohnya seperti ini : beredar himbauan informasi yang mengatasnamakan dari pemerintah bahwa masyarakat untuk mengevakuasi keluarganya untuk siap mengungsi dalam menghadapi bencana alam yang akan terjadi, namun informasi tersebut beredar lewat media sosial, maka disini masyarakat akan mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut benar atau tidak nya kepada pemerintah daerah setempat karena informasi tersebut beredar lewat media sosial yang bukan dari akun pemerintah langsung. Atau masyarakat akan langsung mempercayai informasi tersebut dan segera mengevakuasi keluarganya. Dari contoh ini menggambarkan bahwa komunikasi yang dibangun dapat menghasilkan reaksi berubah-ubah dan menimbulkan perubahan.

Dari latar belakang diatas ini yaitu tentang penanganan bencana, penulis ingin meneliti lebih bagaimana manajemen komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kab.klaten dalam langkah-langkah koordinasi penanganan bencana dengan stakeholder internal maupun eksternal. Hal ini sangat penting untuk diteliti karena BPBD Kab.klaten pemeran utama dalam penanganan bencana di wilayah Klaten. Selain itu juga animo masyarakat klaten terhadap kebencanaan ini sangat peduli contohnya dengan banyaknya didirikan ormas yang dikhususkan untuk menangani kebencanaan. Bisa dibayangkan bagaimana BPBD Kab.Klaten sebagai pemangku utama kebencanaan di klaten koordinasi

dengan induk-induk ini. selain itu juga perlu diketahui disetiap penanganan bencana ada hambatan maupun pendukung.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah :

1. Bagaimana manajemen komunikasi BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin mempunyai tujuan utama, yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana manajemen komunikasi BPBD Kab.klaten dalam penanganan bencana.
2. Menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada umumnya mempunyai manfaat dan bisa menjadi kontribusi bagi para akademisi dan masyarakat umum agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada disekitar mereka dibidang komunikasi bencana yang terdapat dalam sektor penanganan bencana. Secara umum manfaat penelitiannya yaitu:

## 1. Manfaat Akademis :

- a. Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam ilmu metode penelitian, dan kaitannya dengan strategi komunikasi bencana.
- b. Penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan bagi para mahasiswa dan para praktisi akademik sehingga lebih cermat dalam melakukan suatu pola komunikasi bencana yang dilakukan organisasi inipenden.
- c. Sebagai landasan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai komunikasi bencana.

## 2. Manfaat Praktis (Masyarakat Umum)

- a. Manfaat bagi pembaca ialah penelitian ini bisa menjadi referensi dalam bidang akademik, dan bisa menjadi penambah wawasan bagi para pembaca khususnya dibidang komunikasi bencana.
- b. Manfaat bagi BPBD Kab.Klaten sendiri, hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi mengenai pola komunikasi bencana sehingga mampu meningkatkan mutu organisasi menjadi lebih baik lagi.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu dengan harapan sebagai referensi dalam penelitian ini. kenapa peneliti membutuhkan tinjauan peneliti terdahulu dikarenakan dalam setiap isi

penelitian dibutuhkan pembanding sebagai acuan dalam penelitiannya. Hakikatnya bukan sebagai mana yang terbaik antara peneliti dengan penelitian terdahulu, ini dikarenakan untuk membuat penelitian yang sekarang mampu memunculkan yang lebih baru dalam penelitiannya serta mengisi kekurangan penelitian yang terdahulu. Dan inilah penelitian terdahulu yang sebagai acuan dalam penelitian ini :

Penelitian pertama dilakukan oleh Firman Wahyudi dengan judul jurnal “Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Dalam Mencegah dan Menanggulangi Bencana Asap di Riau”. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam mencegah dan menanggulangi bencana asap di Riau.

Metode yang Wahyudi gunakan adalah kualitatif deskriptif yang mana menekankan penjelasan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti memahami apa yang digunakan BPBD Provinsi Riau menggunakan pola roda. Pola roda yang diterapkan BPBD Riau merupakan sinkronisasi antara pola komunikasi yang diterapkan BPBD Riau dengan program kerja BPBD Riau. Melalui komunikasi sebagai salurannya, maka program kerja BPBD Riau dapat berjalan sesuai tujuannya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Donna Asteria dengan judul jurnal “Optimalisasi Komunikasi Bencana Di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana”. Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini

adalah Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengemasan informasi bencana di media massa dalam konteks konvergensi media, dengan adanya media cetak dan online dalam menyajikan pemberitaan mengenai bencana dalam rangka mendukung komunikasi risiko bencana kepada masyarakat.

Metode yang digunakan Asteria adalah pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif yang dilakukan pada kajian level teks dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dengan pengumpulan teks berita yang dipilih secara purposif. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan Pembingkai (framing) berita bencana pada surat kabar harian Kompas dan media online Kompas.com belum menyajikan pengetahuan mengenai bencana secara detil dan jelas.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Arandita Arimastuti, Terbitan Berkala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penelitian terdahulu ini mengangkat judul “Tahapan Proses Komunikasi Fasilitator Dalam Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana”. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah mengenai proses komunikasi Tim COMPRESS LIPI pada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi. Pada akhirnya, penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai tahapan proses komunikasi yang dilakukan Tim COMPRESS LIPI dalam pelatihan evakuasi mandiri bagi masyarakat pantai terhadap bahaya tsunami (pra tsunami) sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana.

Metode yang digunakan oleh Arimastuti adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan varian penelitian studi kasus. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu/orang ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu



memandangnya sebagai bagian atau suatu keutuhan. Dari penelitian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa peneliti menemukannya pada tim COMPRESS LIPI, mereka ada kesamaan dengan pendapat cutlip dan center yang menekankan pada situasi pra tsunami dengan menggunakan yang pertama yaitu pencarian fakta, perencanaan, berkomunikasi, dan evaluasi. Dari keempat inti poin itu mereka gunakan pada masyarakat di daerah pantai untuk siap menghadapi pada saat pra tsunami.

Selanjutnya untuk rujukan yang keempat peneliti memilih jurnal yang dilakukan oleh M.Badri, M.Hubeis, dan Maksu. Alumni Mayor Komunikasi Pembangunan dan Staf Pengajar Mayor Komunikasi pembangunan FEBA IPB. Dengan judulnya yaitu “Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul)”. Rumusan masalah yang diambil oleh Maksu, dkk sebenarnya mereka merumuskan masalahnya ada lima poin adalah yang pertama 1. Bagaimanakah karakteristik personal pemuka pendapat di Kabupaten Bantul. 2. Bagaimanakah komunikasi pemuka pendapat di Kabupaten Bantul. 3. Bagaimanakah keragaan kelompok di Kabupaten Bantul. 4. Bagaimanakah pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul. dan 5. Seberapa besar pengaruh karakteristik personal pemuka pendapat, perilaku komunikasi pemuka pendapat dan keragaan kelompok terhadap pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul.

Metode yang mereka pakai adalah metode survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Dari data yang dipelajari adalah data dari contoh yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi

dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Dari hasil metode survei tersebut dapat ditarik kesimpulan 1. Berdasarkan keaktifan dan partisipasinya di masyarakat, ketokohan yang banyak berperan yaitu tokoh sosial. 2. Pemuka pendapat merespons positif opini yang berkembang di masyarakat serta mendukung penanganan bencana yang dilakukan pemerintah dan LSM. 3. Keragaan kelompok memiliki rata-rata skor tinggi, terutama kekompakan kelompok, suasana kelompok dan tujuan kelompok. Kondisi ini menunjukkan keberadaan kelompok masyarakat sangat penting untuk mendukung kegiatan penanganan bencana. 4. Faktor komunikasi yang berperan yaitu sebagai komunikator dan komunikan bagi pelaksana penanganan bencana dan masyarakat sesuai dengan perannya dalam kegiatan penanganan bencana. 5. Perubahan karakteristik personal dan perilaku komunikasi pemuka pendapat memiliki banyak perubahan yang tidak berpengaruh nyata.

Yang lainnya atau yang kelima yaitu jurnal dari Terbitan Berkala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), oleh Suprpto. Dengan judul "Statistik Pemodelan Bencana Banjir Indonesia (Kejadian 2002-2010)". Dari judul tersebut, rumusan masalahnya adalah berdasarkan data BNPB bahwa bencana yang paling banyak kejadian di Indonesia adalah bencana banjir. Hal ini yang membawa Suprpto untuk memberikan gambaran daerah mana saja yang sering terkena dampak banjir serta memberi saran masukan kepada wilayah tersebut untuk dalam hal pembangunan wilayahnya.

Metode yang digunakan oleh Suprpto adalah dengan data penelitian dimana dari data bencana yang didapat dari BNPB tersebut di analisis data dari tahun 2002-2010. Dari hasil analisis tersebut didapat kesimpulan bahwa daerah yang paling sering terkena dampak dari bencana banjir adalah provinsi daerah Jawa

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk daerah kabupatennya sendiri adalah Kabupaten Bandung, Bojonegoro, dan Cilacap. Hasil lainnya yang cukup prihatin adalah bencana banjir yang terjadi di Indonesia dengan di jumlah dari tahun 2002-2010 adalah 3.479 kali.

Dari beberapa jurnal diatas terdapat perbedaan di setiap pada jurnal sendiri, baik rumusan masalah, metodologi yang dipakai maupun tujuan riset dan penelitian dari jurnal tersebut. Selain itu kebanyakan dari jurnal ini mengungkapkan lebih condong pola komunikasi yang dibangun oleh instansi pemerintah dalam mensosialisasikan penanganan bencana terhadap masyarakat sendiri. Hal sebaliknya peneliti memiliki perbedaan yang mendasar dari jurnal tersebut, yaitu peneliti mengambil dari sisi organisasi yang merupakan non dari pemerintah atau independen. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif peneliti mau membahas lebih dalam pola komunikasi yang dibangun oleh organisasi tersebut.

## 2. **Kerangka Konsep :**

### a. **Bencana**

Bencana adalah suatu kejadian, menimpa atau peristiwa yang terjadi di wilayah masyarakat, serta mengancam kehidupan dan penghidupan manusia, hewan, lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam maupun akibat dari ulah manusia sendiri yang berakibat menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa manusia maupun korban hewan sekalipun, psikologis manusia terutama anak-anak, dan kerugian harta benda. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang definisi bencana sendiri (BNPB).

Menurut UNISDR (United Nation International Strategy for Disaster Reduction) bencana di definisikan sebagai gangguan serius terhadap berfungsinya atau kegiatan suatu masyarakat. pada skala bencana apapun karena kejadian berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi keterpaparan, kerentanan dan kapasitas, yang menyebabkan satu atau lebih hal berikut: kerugian, dampak, dan kerugian manusiawi, material, ekonomi dan lingkungan.

Dalam kamus besar Indonesia, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, bahaya. Lain halnya menurut Susanto (2011 : 87), bencana merupakan suatu kejadian yang sering terjadi akibat antara lain yaitu faktor alam maupun ulah manusia sendiri yang mengganggu kehidupan dunia, misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, terror bom, dan lain-lain.

Lestari Puji (2011:81-84) mengungkapkan bahwa ada terdapat 7 jenis bencana yang ada disekitar kita, yaitu :

1. Banjir, merupakan bencana yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat deras dan dengan lama tanpa berhenti serta bisa seharian. Selain itu dari curah hujan yang sangat tinggi tidak diimbangi oleh pembuangan air yang baik, bisa dengan got-got saluran air yang mampet maupun saluran air yang tidak baik sehingga terjadi lah genangan-genangan air yang tidak terurai dan dinamakan lah banjir.
2. Kebakaran hutan, ini bisa terjadi oleh ulah manusia maupun faktor alam. Dari sisi manusia dan beberapa kasus yang terjadi, mereka dengan sengaja membakar hutan untuk mengganti bekas hutan tersebut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Selain itu dari faktor alam biasanya diakibatkan oleh

kekeringan dengan disebabkan oleh kemarau yang panjang. Dan bisa juga oleh sambaran petir.

3. Bencana tsunami, mungkin yang paling diingat oleh bangsa indonesia adalah yang terjadi di aceh. Perlu diketahui bahwa jenis bencana ini berawal ditimbulkan oleh adanya gempa yang sangat tinggi dan menimbulkan ombak yang sangat besar serta meluluh lantahkan sapuan yang dahsyat ke daratan.
4. Gempa bumi, ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh pergeseran bumi atau istilah lainnya adalah gerakan bumi yang tidak seimbang. Dari skala yang besar maupun rendah gempa ini dapat membahayakan suatu wilayah.
5. Masih ingat dalam ingatan kita pada masa lalu bahwa yang terjadi pada tahun 2010 yaitu meletusnya gunung merapi di pulau jawa, betapa dahsyatnya gunung meletus tersebut. Bahwa pada dasarnya gunung meletus diakibatkan oleh semburan dalam isi perut gunung tersebut dengan mengeluarkan lahar yang sangat panas, dll.
6. Angin puting beliung adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh angin sangat kencang. Betapa dahsyatnya angin ini berputar bahkan memporakporandakan benda-benda yang berada di permukaan tanah.
7. Tanah longsor, ini merupakan suatu bencana yang sering terjadi di indonesia. Bencana ini berawal dari gerakan tanah yang berada diatas atau dataran tinggi lalu jatuh kebawah dengan persikian waktu yang cepat. Akan sangat berbahaya bila mana terdapatnya rumah dibawah tanah yang akan jatuh tersebut.

Menurut Chandra Ade (2011:128) mengatakan bahwa bencana dapat mengakibatkan perubahan dalam tatanan atau aturan sosial masyarakat.

## **b. Manajemen Komunikasi dalam Penanganan Bencana**

Untuk penegertian konsep dari Manajemen komunikasi dalam penanganan bencana kita perlu mendeskripsikan secara terpisah supaya lebih memahami. Yang pertama kita mulai dari manajemen, manajemen adalah berupa pengorganisasian, perencanaan, menggerakkan, dan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan dasar kesepakatan yang telah di capai melalui sumber daya manusia maupun lainnya untuk tujuan yang ingin dituju.

Menurut Lestari Puji (2011:86) berppendapat bahwa manajemen diklasifikasikan menjadi tiga yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan. yang kedua menjaga keseimbangan tujuan, sasaran, dan kegiatan dari pihak yang berkepentingan internal organisasi. Yang ketiga yaitu efektivitas serta efisiensi. Dan intinya adalah manajemen dibuat untuk rencana yang udah dibuat terorganisir dan terimplementasi efektif dan efisien lalu ada evaluasi untuk mecapai tujuan tertentu.

Di dalam kamus besar indonesia, bahwa komunikasi suatu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

(Onong Uchyana Efefendy, 1987:13) Dalam buku pengantar ilmu komunikasi yang ditulis sanityastuti (1997:1) Menjelaskan bahwa istilah komunikasi dan istilah bahasa dari berbagai negara tentang kata komunikasi ini berasal atau bersumber dari kata latin yaitu communis. Communis ini memiliki makna sama dalam artian kebersamaan sama makna

Lain halnya dengan (poedjawijatna, 1983; Hatta, 1987) dalam buku pengantar ilmu komunikasi yang ditulis oleh vardiansyah menjelaskan Komunikasi adalah sebuah ilmu yang berusaha mempelajari bagaimana cara penyampaian pesan antar sesama manusia. Salah satu syarat suatu ilmu yang dimana telah dikatakan pada bagian terdahulu bahwa suatu ilmu harus

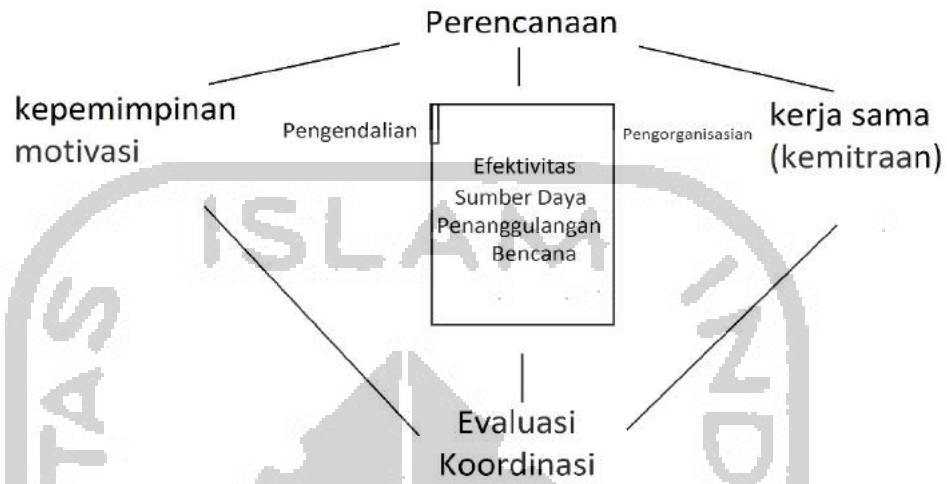
terdapat obek kajian, sebagaimana yang diketahui obek kajian tersebut harus terdiri dari satu golongan masalah yang memiliki sifat yang sama.

Menurut wood (2006: 38) Dalam buku komunikasi bencana yang ditulis susanto (2011:11) mengatakan bahwa komunikasi dapat memberikan pemahaman interaksi antara sesama manusia, yang berlangsung terus menerus dan menciptakan pemahaman bersama. Dengan kata lain susanto mengungkapkan bahwa semua pihak yang melakukan penanganan bencana harus berpijak kepada fungsi komunikasi untuk menciptakan pemahaman bersama dalam membantu korban bencana.

Lestari (2011), komunikasi bencana bahwa komunikasi berfungsi sebagai radar sosial, yaitu memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu tempat. Komunikasi ini memancarkan kepada seluruh masyarakat mengenai bencana apa yang terjadi, kapan bencana itu terjadi, di mana, bagaimana bisa terjadi, siapa yang terkena dampak bencana, bagaimana kondisi mereka, mengapa bisa terjadi, dan masyarakat harus bagaimana.

Menurut Lestari Puji (2011:88) mengatakan bahwa manajemen komunikasi bencana adalah pengaturan penanggulangan bencana antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pendonor. Intinya adalah menciptakan efektif dan efisien dalam penanganan bencana dengan dilandasi adanya kepemimpinan yang proaktif lalu didasari adanya hubungan antara manusia yang baik.

Adapun Lestari (2011: 89) mengungkapkan dalam kerangka konsep manajemen komunikasi bencana menggunakan komunikasi berbagai arah dan berikut gambaran konsep tersebut :



Bagan 1.2 Kerangka Konsep Manajemen Komunikasi Bencana  
(sumber : Lestari, 2006 :199)

Jadi manajemen komunikasi dalam penanganan bencana adalah suatu sistem perencanaan yang terorganisir dalam koordinasi dengan stakeholder lainnya yang berkepentingan dalam penanganan bencana serta tidak lupa dengan koridor birokrasi yang ada.

### c. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu formula strategi yang biasanya digunakan oleh perusahaan maupun organisasi dalam menentukan langkah-langkah seperti apa yang akan di pakai untuk kedepan. Dalam menganalisis ini biasanya mereka melihat berbagai faktor yang sekiranya dapat dijadikan bahan lalu diidentifikasi secara sistematis dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Menurut Freddy Rangkuti (2001:18-19) mengatakan bahwa analisis SWOT dalam menentukan strategi perusahaan maupun organisasi mereka



akan mengidentifikasi dari berbagai faktor secara sistematis lalu didasarkan pada pemikiran secara logika yang memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (Opportunities), namun di satu sisi akan dampak meminimalkan kelemahan (weakness) serta ancaman (Threats).

Selain itu Richard L. Daft (2010:253) berpendapat bahwa analisis SWOT adalah suatu upaya dalam mengenali berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat menentukan kinerja perusahaan. Lalu untuk informasi eksternal dapat diperoleh dari banyak sumber seperti pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan diperusahaan lain. Perusahaan lain banyak menggunakan jasa lembaga pemindaian supaya dapat memperoleh riset data internet, keliping surat kabar analisis tren-tren domestik dan global yang relevan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam metode pengumpulan data Burhan Bungin (2003:42) mengungkapkan bahwa dari apa yang dibutuhkan dalam suatu penelitian akhir harus mampu menghadirkan informasi yang valid dan reliable. Maksudnya adalah dalam penelitian kualitatif serta menggunakan penelitian deskriptif yang mempelajari individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini ingin memahami dan menggambarkan bagaimana pola komunikasi BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana serta peran dalam mewujudkan masyarakat tangguh dalam penanganan bencana.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Di penelitian ini peneliti memperkirakan waktu sekitar dalam 2 bulan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. berlokasi di Jl. Andalas No.3, Semangkak, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57415

### **3. Narasumber dan Informan Penelitian**

Narasumber atau informan dalam penelitian ini, yang peneliti ajukan ada 2 tipe yaitu pemerintah dan masyarakat:

1. Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan Nur Tjahyono
2. Kabid. Kedaruratan dan Logistik Sri Yuwono Haris
3. Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ahmad Wahyudi

Alasan peneliti memilih 3 kabid ini karena mereka berperan dalam pra bencana, pas bencana dan pasca bencana.

### **4. Pengumpulan Data**

- a. Observasi

Idrus (Edisi kedua, 2009:101) mengatakan bahwa observasi atau bisa dibidang pengamatan adalah merupakan pencatatan fenomena yang terajadi dilakukan secara sistematis. Pengamatan bisa dilaksanakan degan partisipatif atau tidak partisipatif. Model observasi yang akan digunakan peneliti adalah non partisipasi dengan mengunjungi secara langsung kantor BPBD Kab.Klaten dan masyarakat KAB.Klaten yang dipilih secara langsung oleh peneliti. Dalam laporan hasil observasi tersebut akan dituangkan dalam sebuah laporan tersusun serta sistematis dengan

mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat dalam membuat laporan penelitian.

b. Wawancara

Bungin (2003:108) menjelaskan bahwa wawancara mendalam, proses dimana memperoleh hasil data keterangan dari orang yang di wawancara dengan bagaimana pewawancara dan orang yang diwawancara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka. Selain itu dalam tahap wawancara dapat menggunakan pedoman atau guide namun dapat juga tanpa menggunakannya. Dari wawancara ini kita mendapatkan keterlibatannya dalam kehidupan orang yang diwawancara.

c. Dokumentasi

Menurut Gulo (2002:123) “Dokumentasi adalah catatan-catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa waktu yang lalu, namun seiringnya waktu dokumentasi dapat berbentuk dalam video maupun foto”.

## 5. Analisis Data

1. Reduksi data

Idrus (2009:150) mengungkapkan bahwa reduksi data ialah sebagai transformasi data kasar yang muncul dari suatu catatan yang terjadi di lapangan. Yang artinya semua data yang dikumpulkan di lapangan akan di proses pemilihan dan selain itu dapat melakukan pengabstrakan serta pemusatan pada perhatian.

2. Display data

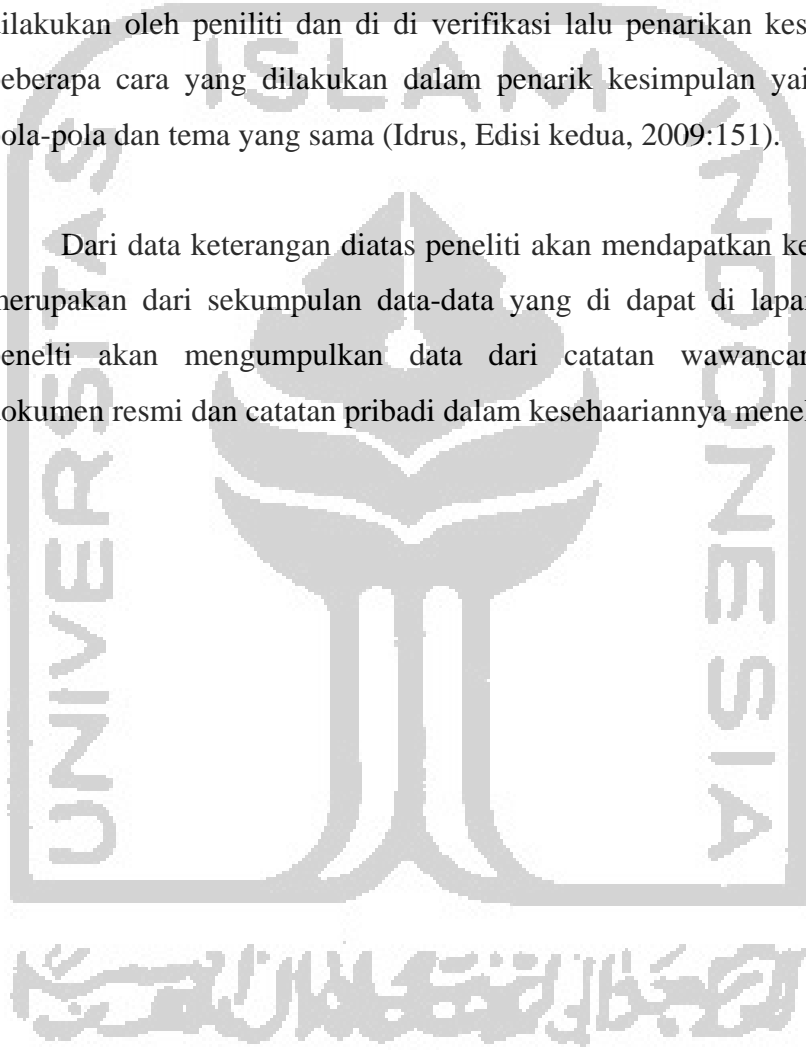
Display data dalam penyajinya berbentuk diagram, metrik, tabel dan bagan yang di dapat dari sekumpulan data informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Bungin, 2003 : 70).

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarik kesimpulan adalah inti dari akhir pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti dan di verifikasi lalu penarikan kesimpulan. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam penarik kesimpulan yaitu pencatatan pola-pola dan tema yang sama (Idrus, Edisi kedua, 2009:151).

Dari data keterangan diatas peneliti akan mendapatkan keabsahan yang merupakan dari sekumpulan data-data yang di dapat di lapangan. Artinya peneliti akan mengumpulkan data dari catatan wawancara, observasi, dokumen resmi dan catatan pribadi dalam kesehaariannya meneliti.



## BAB II

### GAMABARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Jenis Bencana Kab.Klaten

Kab.Klaten ini merupakan daerah dimana memiliki potensi hampir semua jenis bencana yang ada di Indonesia ada di Kab.klaten. Mulai dari erupsi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga bencana-bencana hidro-metrologi. Perlu diketahui bencana-bencana hidro-metrologi adalah bencana yang dipengaruhi oleh faktor-faktor meteorologi, contohnya beberapa bencana yang terjadi di kab.klaten adalah bencana angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lainnya (Rampangilei, <http://jogja.tribunnews.com/2016/11/13/klaten-jadi-percontohan-pengurangan-resiko-bencana>, akses 17 oktober 2018).

Disisi lain pemerintah pun beberapa tahun lalu telah meresmikan pusdalops di BPBD Kab.Klaten. Pusdalops ini adalah pusat pengendalian operasi dimana isinya berupa perangkat-perangkat teknologi yang mendukung dalam penanganan bencana. Pusdalops ini beroperasi selama 24 jam jadi akan mengendalikan serta memantau kebencanaan yang meliputi wilayah kab.klaten. Jadi semua informasi terkait dalam bencana yang terjadi akan masuk ke dalam pusdalops, serta keputusan apa saja yang akan diambil dalam penanganan bencana akan keluar dari sini.

Ada empat jenis bencana yang jadi latihan simulasi BPBD Kab.Klaten dalam penanganan. Antara lain yaitu gempa bumi, kebakaran, erupsi, hingga banjir, dari ke empat jenis bencana itulah BPBD Kab.Klaten beberapa kali melaksanakan simulasi kebencanaan di berbagai tempat. Mulai dari sekolah, perguruan tinggi, instansi, relawan dan lainnya, ini merupakan bentuk bagaimana BPBD Kab.klaten ingin semua sektor di wilayah Klaten dapat menangani bencana secara mandiri.

## **B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Klaten**

BPBD Kab.Klaten di dirikan oleh bupati Kab.Klaten sebagai badan yang menangani kebencanaan di wilayah Kab.Klaten. BPBD Kab.klaten ini didirikan pada tahun 2011 dengan peraturan daerah no 87 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kab. Klaten serta yang diterbitkan oleh bupati kab.klaten dengan no 35 tahun 2011 rincian tugas.

1. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
6. Mempertanggungjawabnkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi BPBD Kab.Klaten yakni sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepatserta efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatann penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sedangkan misi BPBD Kab.Klaten yakni sebagai berikut:

1. Mengembangkan tata kelola dan memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Membangun kerjasama dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan penanggulangan bencana.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara profesional, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana baik pada kondisi sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana.
5. Melindungi masyarakat dan aset-aset yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten dari ancaman bencana.

Dalam mewujudkan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Adapun beberapa point yang menjadi Visi dari BPBD Kab.Klaten :

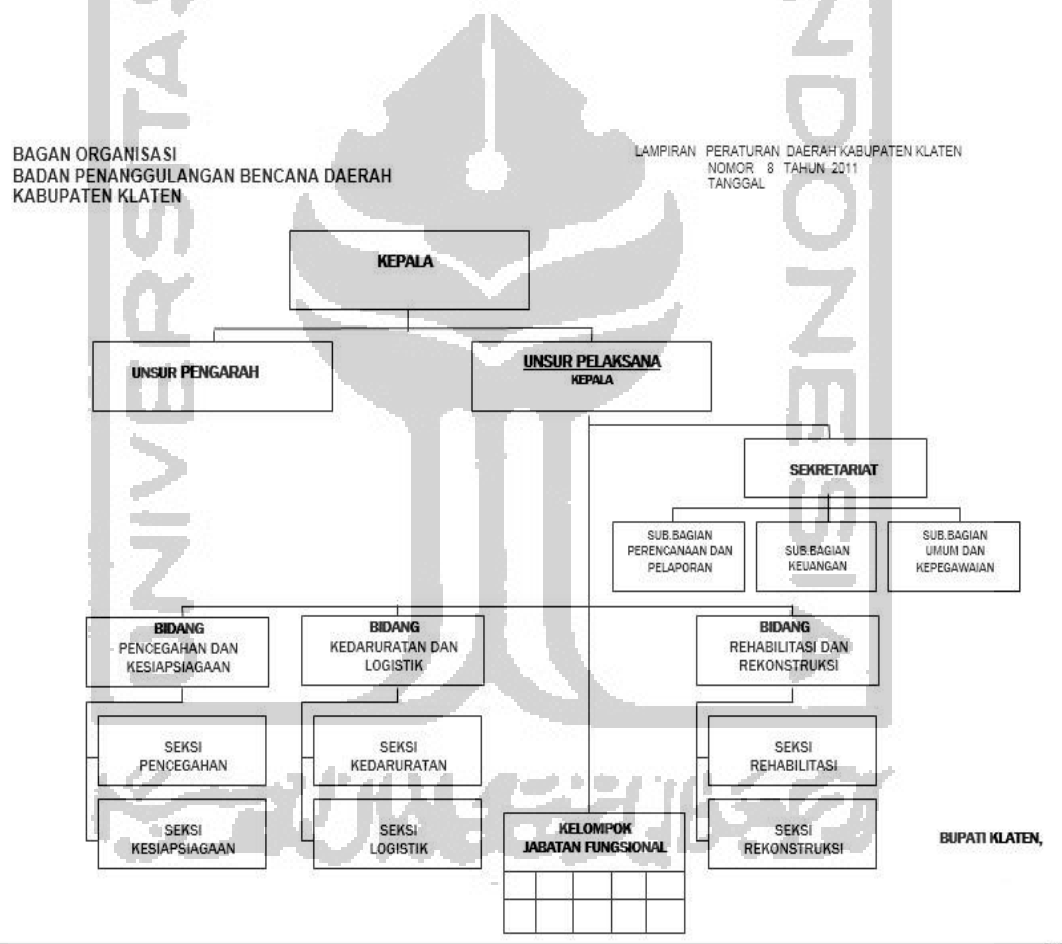
1. Membangun masyarakat dalam ilmu pengetahuan menghadapi bencana, serta dibarengi dari sisi teknologi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang akan digunakan.

Salah satu bukti nyata pemerintah serius dalam sarana prasarana adalah didirikannya ruangan pusat pengendalian operasi (pusdalops). Pusdalops ini didirikan sebagai gedung yang beroperasi dengan peralatannya serta bekerja selama 24 jam memantau dan mengendalikan kebencanaan.

Untuk tugas dan fungsi BPBD Kab.klaten tentu memiliki standarisasi penanganan bencana. Dalam penanganan bencana mereka mempunyai pedoman serta pengarahan dalam menghadapi pra bencana ,saat bencana atau penanganan darurat dan pasca bencana. Pedoman ini tentu mereka akan membutuhkan informasi data-data yang mendukung dalam setiap pemetaan suatu bencana yang terjadi. Dari informasi yang di dapat itulah maka akan di koordinasikan di dalam

internal organisasi sendiri dan akan dihitung bagaimana keuntungan dan kerugian yang bakal di dapat.

Dalam struktur BPBD Klaten ini dipimpin oleh kepala badan yaitu sekretaris daerah dibantu Kepala unsur pelaksana yaitu H Bambang Giyanto, sekretaris yaitu Dodhy Hermanu, selanjutnya Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan Nur Tjahyono, Kabid. Kedaruratan dan Logistik Sri Yuwono Haris, Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ahmad Wahyudi. Selanjutnya dibawah ini stuktur organisasi BPBD Klaten:



Bagan 2.1 Struktur Organisasi BPBD Klaten

(sumber: Website Resmi BPBD Klaten <http://bpbdklatenkab.go.id/>) diakses tanggal 21 November 2019 pukul 22.46 WIB)



BPBD Kab.Klaten juga mempunyai sekolah sungai indonesia, ini merupakan gerakan pengurangan resiko bencana. Sekolah sungai ini didirikan untuk melahirkan relawan-relawan kebencanaan serta dapat menularkan ilmu yang di dapat kepada masyarakat klaten sendiri dan lainnya. Yang mengikutinya pun dari berbagai kalangan bisa dari anak sekolah, orang tua, kepala desa, dll. Selain itu sekolah sungai ini mengajarkan nilai kepedulian lingkungan terutama dalam menjaga sungai selain kebencanaan. Ini merupakan berkesinambungan dengan misi kab.klaten yaitu membuat masyarakat tangguh dalam bencana.



**Gambar 2.1 Spanduk Sekretariat Sekolah Sungai**  
(Dokumentasi Pribadi)

Selain itu juga BPBD Kab.Klaten membuat program pelatihan fasilitator bagi relawan difabel unit layanan disabilitas. Ini merupakan bahwa BPBD Kab.Klaten tidak melupakan kaum difabel. Dalam pelatihan ini kaum difabel yang mau jadi relawan akan diberi pelatihan-pelatihan pengetahuan kebencanaan serta pertolongan pertama seperti apa dengan sesuai kemampuannya. Lalu mereka yang telah diberi pelatihan akan memberikan pemahaman dan masuk ke sekolah luar biasa maupun desa-desa yang ada masyarakatnya kaum difabel.



**Gambar 2.2 Spanduk Pelatihan Fasilitator Relawan Difabel**  
(Dokumentasi Pribadi)

## **BAB III**

### **TEMUAN PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan apa saja yang di dapat penulis dalam penelitian ini. Dengan objek utama BPBD Kab.Klaten lantas penulis memulai serangkaian perijinan birokrasi yang ada di pemerintahan Kab.Klaten, karena BPBD ini di bawah pemerintah kab.Klaten. Dan akhirnya penulis mendapat kesempatan untuk observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber dari BPBD Kab.Klaten. kegiatan observasi sendiri diatur jadwal oleh BPBD Kab.Klaten, sekaligus dapat langsung mewawancarai narasumber yang kebetulan semua narasumber yang sudah di pilih sebelumnya sedang berada di kantor.

Sesuai dalam teori manajemen komunikasi ada 4 kategori yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Yang pertama mendefinisikan dahulu masalah (defining public problem) mulai dari pra bencana apa saja hambatan-hambatan permasalahan di masyarakat dalam pengetahuan menghadapi bencana dan disini peran BPBD Kab.klaten. Lalu pada saat bencana tentu ini merupakan apakah BPBD serta masyarakat bersinergi menghadapi bencana. Selanjutnya yang kedua adalah rencana dan program apa saja yang di ambil untuk manangani kebencanaan (planning and programming). Lalu ketiga tentu implementasi (taking action and communication) dari apa yang sudah di rencanakan BPBD Kab.Klaten serta program-program apa saja yang dipakai untuk mendukung penanggulangan bencana ini. yang keempat atau yang terakhir ini yaitu evaluasi (evaluating the program) tentu ini sangat dibutuhkan bagi sebuah organisasi terutama BPBD dalam upaya menilai dan mencari apa yang kurang dari apa yang sudah dikerjakan.

## A. Situasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Oleh BPBD Kab. Klaten

Yang terjadi dalam setiap ada bencana sering kali ditemui informasi-informasi yang salah artinya info tersebut adalah hoax. Ini yang membuat masyarakat menjadi panik terhadap kepastian informasi tersebut. Hal yang sering ditemui adalah banyak spekulasi dari masyarakat sendiri dalam menilai bencana apa yang terjadi, misalnya dalam menilai bencana gunung merapi, apa itu dia meletus magmatik atau freatik. Seperti yang dikatakan asri staff Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menceritakan letusan merapi tahun kemarin.

*“geger itu, terus di beberapa itu banyak, masih banyak spekulasi. Ini meletus magmatik apa freatik, atau eksposif, atau gimana kok engga ada tanda-tanda gitu. Waktu itu masih status normal. Terus beberapa ada yang konfirmasi ke BPBKG, beberapa ada yang melihat sosmed, beberapa juga monitor laporan dari teman-teman di atas.”*

(Wawancara Asri, staf Kabid.Pencegahan dan kesiapsiagaan , 29 Agustus 2018)

Dari masalah tersebut BPBD Kab.Klaten sebenarnya sudah membuat sistem untuk mengatasi hal tersebut. Dari mulainya dibuat SOP penanganan bencana yang seperti apa, jadi artinya dalam setiap macam-macam bencana dibuat khusus SOP nya tersendiri. Karena untuk teknis dalam penanganan setiap bencana yang berbeda akan beda. Seperti yang dikatakan asri mengatakan dalam tindak lanjut penanganan BPBD mempunyai SOP sendiri.

*“terus kemudian untuk pola tindak lanjut itu yang baru berpola. Kita harus seperti apa, oh SOP nya seperti apa. Jadi ada standar operating prosedurnya, nah yang kalau gunung merapi freatik, ya kita SOP nya yang pertama teman-teman relawannya harus kita pegang dulu, jadi penduduk yang di kawasan rawan bencana, kita harus banyak komunikasi kesana, supaya kalau terjadi apa-apa mereka itu, isu-isu itu tidak terlalu berkembang luas dan mereka merujuknya ke kita.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Dalam kasus merapi serta mereka yang disebut asri staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan adalah masyarakat yang wilayahnya berada dekat dengan gunung merapi, lantas mereka termasuk dalam KRB (kawasan rawan bencana). Disini mereka sudah dibekali dengan pengetahuan bagaimana mereka koordinasi dengan masyarakat sendiri, evakuasinya bagaimana, memiliki akses sendiri dengan BPTKG dan segala macam penanganan bencana, jadi mereka sudah mandiri.

Dari segi sinyal telekomunikasi pun sangat dibutuhkan dalam pengkoordinasian. Ini memang harus diperhatikan untuk pemerintah dan penyedia operator. Karena bencana alam yang besar sering terjadi susah sinyal operator, bagaimana masyarakat untuk bisa koordinasi dengan BPBD Kab.Klaten maupun menghubungi sanak keluarga yang lain. Belajar dari pengalaman sebelumnya, BPBD Kab.Klaten melakukan terobosan yang lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan radio repiter atau HT. Seperti yang dikatakan pak haris.

*“Ada itu ada hp kita kan ada repiter di sana repiter kita pasang di wilayah gunungkidul yang mana insya allah itu no problem katakanlah seperti di lereng merapi ini sinyal agak kurang bagus kadang-kadang selain operator telkomsel kalau kurang bagus jadi teman-teman kami yang ada di lapangan baik itu relawan kemudian pers segala macamnya ini lebih banyak menggantung kan pada radio tadi yah ht”*

(Wawancara Haris, Kabid. Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Handie talkie atau singkatan HT ini harus memiliki ijin serta memiliki frekuensi yang lebih besar dan bebas. Alat inilah yang digunakan BPBD dengan relawan-relawan tersebar di berbagai wilayah yang termasuk rawan

bencana. Dan disini BPBD Kab.Klaten memberikan hibah kepada relawan tersebut, seperti yang diungkapkan asri.

*“jadi kita ada hibah HT ke kawasan rawan bencana juga dan itu kita serahkan ke relawan desa setempat”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Untuk hal bencana alam yang besar seperti gunung merapi erupsi BPBD Kab.Klaten tidak bisa bergerak sendiri. Karena gunung merapi butuh ekstra tenaga dan pikiran lebih sebab bencana ini membuat serba bingung dan kondisinya. Berbeda dengan bencana yang tergolong ringan, ini dapat diatasi dengan baik oleh BPBD Kab.Klaten. Oleh karena itu mereka butuh bantuan BPBD tetangga dalam penanganan bencana tersebut. Seperti yang dikatakan haris mereka dalam hal ini BPBD Kab.Klaten kalau memang keadaannya sudah tidak mampu atau diatasi oleh BPBD, mereka akan mengkontak langsung dengan tetangga.

*“bencana yang sangat besar misalnya bencana gempa bumi bencana erupsi merapi itu kan semuanya kan serba bingung kan semuanya karena kondisi bingung ya otomatis kita bpbd daerah ini kalau memang sudah tidak mampu ya kita minta bantuan dari tetangga sebelah kabupaten boyolali kabupaten yang lain ya jadi itu jadi satu hal prinsip dalam penanggulangan bencana ini tidak mengenal batas wilayah.”*

(Wawancara Haris, Kabid. Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

## **B. Tugas Pemerintah Dalam Penanganan Bencana**

### **1. Kewajiban Pemerintah**

Perlu untuk di ketahui bahwa indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 pada huruf (a) dijelaskan bahwa negara wajib melindungi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam bencana. Lebih jelasnya sebagai berikut.

*“bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

(UU Penanggulangan Bencana NO.24 TAHUN 2007)

Dalam turunannya undang-undang tersebut dimana tidak hanya pemerintah pusat semata yang bertanggung jawab melainkan untuk pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Seperti yang dituangkan dalam Bab III tentang tanggung jawab dan wewenang pada Pasal 5.

*“Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.”*

(UU Penanggulangan Bencana NO.24 TAHUN 2007)

Maka dari itu beberapa daerah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri termasuk Kab.Klaten memilikinya. BPBD Kab.Klaten sendiri, peneliti mendapat data wawancara dengan bapak haris bahwa bupati kab.klaten mengeluarkan peraturan tentang

penanganan kedaruratan kebencanaan disitu dijelaskan cara penanganan dan prosedurnya.

*“jadi kita sudah ada jadi kabupaten klaten sudah ada peraturan bupati klaten no 7 tahun 2014 tentang penanganan kedaruratan bencana di kabupaten klaten disitu diatur tentang hal-hal yang berkaitan penanganan kebencanaan mulai dari bencana erupsi, gunung merapi kemudian bencana gempa bumi tektonik kemudian bencana banjir kemudian bencana tanah longsor dan bencana jenis lainnya, masing-masing itu sudah ada prosedurnya mulai dari baik manajemen, manajemnya dalam arti pengoragnisian pihak pihak terkait dalam penanganan kedaruratan.”*

(Wawancara Haris, Kabid Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Dari pasal dan peraturan bupati diatas menegaskan bahwa masyarakat dijamin dan mendapatkan hak dalam diberikan perlindungan yang aman dari bencana alam. Bentuk apa yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan informasi mengenai kebencanaan dan menyadarkan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Seperti desa 3 lereng merapi yaitu 3 desa, desa tegalmulyo, desa sidoredjo, desa balerante. Namun dari sisi menyadarkan masyarakat 3 desa tersebut tidak perlu lagi, karena kesadaran mereka terhadap bencana cukup besar malah mereka secara mandiri evakuasi sendiri ketempat yang mana telah disepakati. Hal itu diungkapkan oleh bapak harris.

*“pola evakuasinya dilakukan secara mandiri artinya masyarakat dengan segala kesadarannya yang sudah sangat tinggi.”*

(Wawancara Haris, Kabid Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Dari sisi kesadaran masyarakat yang sudah bagus dalam bencana tersebut tentu mereka harus dibekali pengetahuan bencana seperti apa yang mereka hadapi. Sesuai dengan amanat peraturan bupati no 7 tahun 2014 tentang penanganan kedaruratan bencana. Disitu bagaimana pemerintah klaten yang melalui badan penanggulangan bencana daerah wajib memberi pengetahuan bencana-bencana apa yang berpotensi di wilayah klaten untuk bagaimana menghadapi bencana tersebut.

Peneliti mendapati bahwa pemerintah kab.klaten sudah sesuai koridor bagaimana mereka melindungi masyarakatnya dari ancaman bencana. Dan masyarakatpun perlahan demi perlahan sudah sangat tinggi kesadaran mereka terhadap bencana dan mereka mau berkerjasama dengan pemerintah. Mulai program desa pesuduluran, pelatihan dan lainnya ini tentu yang lainnya dan utama adalah pemerintah selalu menginformasikan potensi bencana yang akan datang. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki kesan bahwa mereka merasa aman serta nyaman.

## **2. Penanggungjawab Informasi Kebencanaan Gunung Merapi**

Di bagian ini peneliti ingin membahas atau menggali siapa yang bertanggung jawab dalam mempublikasi informasi bencana wilayah Kab. Klaten terhadap masyarakat. Seperti yang diungkapkan haris bahwa semua informasi bencana ada di pusdalops sendiri, pusdalops ini memang secara unit di manager oleh kepala bidang kedaruratan dan



logistik. Tetapi ketika data informasi tersebut di sebarakan kepada masyarakat ini yang menyampaikan adalah kepala pelaksana BPBD.

*“Ya pusdalop tadi ,ini walaupun kami secara jabatan sebagai kepala bidang kedaruratan dan logistik ini otomatis selaku manager pusdalop nah jadi secara unit, unit teknis pusdalop ini ya memang menjadi tanggung jawab kami tetapi ketika keluar begitu data yang diolah ini kami sampaikan kepada pimpinan kepala pelaksana bpbd untuk dipublish kan untuk di share kan jadi kami sebagai penyaji penyaji data pada atasan.”*

(Wawancara Haris, Kabid kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Untuk yang berkepentingan di lapangan dalam penanganan bencana sendiri Haris mengatakan ini adalah tugas bersama. artinya semua unsur masyarakat kabupaten klaten memiliki andil dalam penanganan bencana. Semuanya harus menyamakan pemikiran bagaimana penanganan bencana yang benar. Koordinasipun dilakukan pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Koordinasi ini pun di komandoi oleh BPBD sendiri.

*“Jadi 1 hal yang utama dalam penanggulangan bencana dalam penanggulangan bencana ini menjadi tugas bersama artinya pemerintah dunia usaha dan masyarakat dan di tinggal dilihat sekupnya kalau bicara nasional pastinya pemerintah pusat, kemudian pengusaha tingkat pusat kemudian dunia usaha pusat yang artinya sebagai contoh real di kabupaten klaten ya sama penangulangan bencana menjadi tugas bersama, yang mana itu mulai dari pra bencana saat bencana pasca bencana pun kita selalu untuk mengkoordinasikan, berbicara berdiskusi menyamakan pemahaman menyamakan pandangan sehingga pada saat*

*terjadi bencana ini bpbd artinya pemerintah daerah penanggulangan bencana ini lebih banyak sebagai komandan pemegang komando artinya yang bergerak ini ya semua pihak tadi swasta artinya dengan mungkin sumber daya alam yang dimiliki misalnya sumber daya dana dan kemudian sumber daya logistik kemudian tentunya masyarakat.”*

(Wawancara Haris, Kabid kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Untuk memudahkan dalam penyaluran informasi atau koordinasi pada saat bencana tentu membutuhkan alat telekomunikasi. Biasanya BPBD menggunakan media hp aplikasi whatsapp maupun media sosial, namun bilamana sinyal hilang atau terganggu jaringan bpbd sudah mengantisipasi dengan memasang repiter radio. Seperti yang diungkapkan Haris bahwa yang menangani repiter radio tersebut BPBD di bantu oleh ORARI maupun ada rapi radio antar penduduk.

*“Ada itu ada hp kita kan ada repiter di sana repiter kita pasang di wilayah gunung kidul yang mana insya allah itu no problem katakanlah seperti di lereng merapi ini sinyal agak kurang bagus kadang-kadang selain operator telkomsel, kalau kurang bagus jadi teman-teman kami yang ada di lapangan baik itu relawan kemudian pers segala macamnya ini lebih banyak menggantungkan pada radio tadi yah ht. Artinya kita anu pusdalop ini karena ada kita dibantu oleh orari yang tadi radio amatir tadi kemudian oleh rapi radio antar penduduk pokoknya semua di pusdalop ini mereka tempatkan anunya istilahnya pesawat induknya induknya untuk memantau.”*

*(Wawancara Haris, Kabid Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)*

Khusus untuk bencana gunung merapi yang di kawasan rawan bencana, masyarakatnya sudah memiliki akses langsung dengan BPPTKG. Bahkan mereka memiliki sudah punya group sendiri atau lingkaran di masyarakat sendiri jadi tersampaikan semua masyarakatnya. Hal itu diungkapkan asri bagaimana masyarakat mendapatkan informasi.

*“Itu selalu kita wanti-wanti untuk merujuk ke yang terpercaya dan mereka sudah, karena sangat pengalaman Merapi, mereka juga punya data, akses sendiri ke BPTKG, mereka punya grup sendiri, grup lingkaran merapi itu punya sendiri. Jadi, Jogja-Klaten-Sleman-Magelang dan Boyolali. Ada sesuai mereka juga, merapi namanya.*

*(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 28 Agustus 2018)*

Hal ini menjelaskan bahwa baik BPBD Sleman maupun BPPTKG bisa menyampaikan informasi kebencanaan Gunung Merapi langsung ke perangkat desa atau relawan tanpa harus melalui Bupati. Namun, keaktifan atau kesiapan dalam mempublikasikan informasi kebencanaan antara BPBD atau BPPTK bisa terjadi sebaliknya. Bisa saling tukar menukar antara masyarakat dengan BPBD hal tersebut diungkapkan oleh asri dalam wawancara.

*“Tapi yang penting adalah tokoh-tokoh masyarakat di kawasan rawan bencana itu kita punya kontakannya. Jadi ketika ada informasi penting atau mereka ada informasi penting, kita bisa saling tukar-menukar informasi kan. Oh*

*ada isu ini lho, isu misalnya isu tanggal 26 Agustus besok ada gempa, misalnya. Kita kan bisa konfirmasi. Terus kita konfirmasi ke, dianggap percaya, misalnya BMKG atau BPTKG. Jadi kayak gitu.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 28 Agustus 2018)

BPPTKG dan BMKG adalah 2 lembaga yang beda. (BPPTKG) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, menyusun rencana dan program serta pengelolaan kerjasama dan informasi serta pelaksana mitigasi bencana Gunung Merapi sedangkan BMKG atau kepanjangannya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama pengarah informasi bila ada indikasi cuaca ekstrim maupun bencana. Hal tersebut dikatakan Asri.

*“ada hal lain yang belum maksimal yaitu di terbatasnya regulasi buat radio komunitas, padahal radio komunitas masih dianggap penting oleh masyarakat terutama para orang tua.”*

(wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 28 Agustus 2018)

Selain itu ada peran yang berbeda antara BPPTKG dengan BPBD, BPPTKG adalah sebagai fasilitator, pengarah dan pemberi rekomendasi mengenai aktifitas Gunung Merapi kepada pemerintah, seperti BNPB dan BPBD. Sedangkan BPBD berperan sebagai pelaksana penanggulangan bencana dan penyebaran informasi agar sampai kepada masyarakat. Namun peneliti melihat bahwa peran BPPTKG dengan masyarakat memiliki koneksi seputar informasi kebencanaan.

## **B. Program dan Perencanaan BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana**

Pemetaan wilayah yang indikasi rawan bencana, ini merupakan hal yang penting dalam upaya penanganan bencana. Dari sini kita bisa melihat wilayah mana saja yang memiliki rawan bencana. Dalam upaya pemetaannya pun dilihat dari sejarah wilayah tersebut apa sudah terjadi bencana apa belum serta dari rekan-rekan peneliti kewilayahan yang punya kemampuan dibidangnya dalam menentukan wilayah tersebut memiliki indikasi bencana.

### **1. Sekolah Sungai Klaten**

Program sungai klaten ini merupakan suatu hal yang bagus dalam upaya menjaga sungai. Dalam arti masyarakat bisa menjaga dan merawat sungai secara kesadaran mandiri. Ini merupakan kegiatan program sekolah sungai pertama di Jawa Tengah yang dimulai pada tahun 2016. BPBD Kab. Klaten sebagai tuan rumah sekaligus pencetus sekolah sungai ini diikuti banyak relawan serta tokoh masyarakat. Mereka antusias mengikuti kegiatan sekolah sungai ini, karena ilmu yang di dapat bisa di salurkan lagi kepada masyarakat klaten sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Asri sebagai staff bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

*“arti penting sekolah itu adalah menghasilkan relawan yang dapat memiliki sungai binaan. Disamping itu, kegiatan mereka akan berfokus pada upaya penyadaran masyarakat terkait pentingnya merawat sungai.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Seperti yang dijelaskan pada paragraf di atas bahwa sekolah sungai ini bisa menjaga dan merawat sungai. Arti lengkapnya adalah masyarakat terbangun kesadaran bahwa sungai ini menjadi

tanggung jawab mereka dan bukan hanya pemerintah semata. Serta dapat pengendalian pencemaran dari limbah-limbah masyarakatnya dan berusaha menjaga sungai ini tidak degradasi. Lalu lainnya yaitu sungai ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber inovatif atau sebagai tempat wisata maupun ekonomi kreatif.



Gambar 3.1 Kegiatan sekolah sungai  
(Dokumentasi BPBD Kab.Klaten)

## 2. Desa Tangguh

Desa tangguh adalah suatu desa yang di bina dalam penanganan bencana. Jadi mereka diajarkan bagaimana evakuasi, bagaimana mereka dilatih cara penanganan menghadapi macam-macam bencana ini seperti apa, serta mereka memiliki alat pendukung penanganan bencana semacam HT alat komunikasi, akses jalan evakuasi, transportasi, ini mereka harus memilikinya. Selain itu mereka harus punya tim siaga bencana atau tim relawan, ini berguna untuk mengkoordinir masyarakat desa saat bencana akan datang. Seperti yang dikatakan ibu asri, beliau mengatakan untuk desa yang termasuk kategori wilayah rawan bencana mereka punya tidak tim siaga bencana, tim relawan bencana.

*“harus seperti apa, apa saja yang harus dipunyai desa, kayak kamu punya tim siaga desa nggak, atau tim relawan bencana, apa saja, dan itu sudah ada di BMPB, terus itu yang desa tangguh.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Selain itu untuk masyarakat sendiri mereka dibekali pelatihan menghadapi bencana seperti apa. Bagaimana evakuasi harus kemana, bencana banjir, bencana angin puting beliung, dan lainnya. Seperti yang diungkapkan ibu asri bahwa BPBD Kab.klaten memberikan pelatihan terhadap masyarakat tersebut dengan ahlinya.

*“Terus ada kita juga beberapa pelatihan ke desa untuk pengurangan resiko bencana ada harus pelatihan ke sekolah, SSB, sekolah siaga bencana, pelatihan ke pra sekolah.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Dalam pelatihan sendiri ada beberapa tehnik yang diajarkan, seperti bagaimana tutupi kepala, ketika gempa datang mereka harus cepat lari ke bangunan sudut, dan lainnya. Untuk memberi pelatihan kadang BPBD tidak jalan sendiri ada juga kerjasama dengan ahli diluar BPBD. Seperti yang diungkapkan ibu asri pelatihan untuk disabilitas mereka ada kerjasama dengan NGO.

*“Kalau pelatihan yang kita selenggarakan sendiri itu masih murni dari, penganggarannya ya, murni dari APBD, tapi ada beberapa pelatihan disabilitas kita kerja sama, jadi kita ajukan proposal dengan pihak NGO.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Untuk sektor evakuasi masyarakat desa di wilayah rawan bencana mereka diharapkan evakuasi secara mandiri. Karena kalau tidak dan hanya menunggu tim dari BPBD itu akan memakan waktu sebab bencana alam besar akan datang dengan cepatnya. Tentu untuk evakuasi secara mandiri, mereka tidak serta merta evakuasi namun mereka sudah dibekali harus kemana evakuasi atau tempat yang aman. Seperti yang di ungkapkan bapak haris.

*“pola evakuasinya dilakukan secara mandiri artinya masyarakat dengan segala kesadarannya yang sudah sangat tinggi kemudian dengan dukungan sarana, prasarana transportasinya sebgaimana diketahui diatas itu yaitu armada truk, kendaraan roda 4 itu ratusan dan itu sangat sangat memungkinkan malah sudah berlebih artinya penduduk yang harus turun mengevakuasi diri secara mandiri.”*

(wanwancara Haris, Kabid.kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Tentu untuk evakuasi dibutuhkan adanya transportasi yang cukup membawa semua masyarakat wilayah bencana tersebut. Karena dibutuhkan cepat upaya untuk mengevakuasi, kendaraan ini lah yang dibutuhkan dan memadai. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah alur jalan evakuasi tersebut supaya tidak ada macet yang akan menghambat evakuasi. Ini lah peran polri dan tni dalam membantu evakuasi, meraka harus sudah punya planning teknis alur kendaraan evakuasi tersebut supaya tidak tersendat dengan alur berlawanan. Hal itu diungkapkan bapak haris.

*“tranportasinya sudah sudah lebih dari cukup malah lebih, malah kelebihan kemudian kluster*



*sektor selanjutnya sektor transportasi yang kami sampaikan yang mana disini tni, polri, bpbd, pmi ini sudah kita koordinasikan semua yang artinya berbagi peran. tni, polri yang pasti menjaga keamanan di wilayah desa yang ditinggalkan oleh masyarakatnya, yang juga akan mengamankan proses perjalanan evakuasi dari atas menuju shelter atau barak pengungsian tersebut. kemudian pmi pastinya mendukung dalam rangka menyediakan apa itu? Sarana prasarana seperti ambulance kemudian hal yang lainnya, yang lebih penting lagi yaitu koordinasi tingkat lapangan yang mana pada proses evakuasi mandiri masyarakat turun yang sendrinya menuju barak shelter pengungsian itu tidak terjadi arus sebaliknya dari bawah menuju keatas, jadi kita sudah susun yaitu jalur yang sudah kita tentukan posisi kordinatnya.”*

(wanwancara Haris, kbid. Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Nah untuk evakuasi pasti ada tujuan kemana mereka harus evakuasi, disini BPBD sudah mempersiapkan betul bagaimana mereka harus evakuasi kemana. Khususnya untuk bencana merapi dibuatlah posko kedaruratan atau barak pengungsian. Barak pengungsian ini, BPBD Kab.klaten sudah mempersiapkan barak shelter pengungsian secara permanen. Barak ini memang khusus bagi wilayah klaten yang berdekatan dengan gunung merapi jadi desa tersebut akan di evakuasi ke desa tetangganya yang memang jauh dari radius merapi atau kategori aman. Hal itu diungkapkan bapak haris, bahwa desa tersebut sudah dibuat terencana.

*“barak atau pengungsian yang mana sektor barak yang ada di kabupaten klaten ini ada 3 jadi ada 3 desa kawan rawan bencana klaten , yang sebelah timur itu namanya desa tegalmulyo, desa tegal mulyo ini diarahkan untuk nanti ke shelter kebarak pengungsian di desa demak hijau kecamatan ngarangnongko kemudian desa*

*sidorejo itu posisi desa yg di tengah itu diarahkan nanti ke barak di desa menden kecamatan kebonarum kemudian berikutnya yang paling barat itu.. perbatasan dengan kabupaten sleman yaitu desa balerante . ketiga desa itu semuanya di kecamatan kemalang, desa balerante nanti masyarakatnya kita arahkan shelter barak pengungsian di desa kebondalemalar kecamatan prambanan, jadi artinya semua sudah terencana, shelter itu terbuat bersifat permanen.”*

(wawancara Haris, Kabid kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Selain itu tidak hanya evakuasi manusianya saja, BPBD Kab.Klaten mengevakuasi juga ternak hewan yang dimiliki masyarakat tersebut. Hal ini jadi perhatian BPBD karena masyarakat tersebut tidak mau evakuasi kalau ternak hewan tersebut tidak dibawa olehnya. Hewan tersebut diantaranya seperti sapi, kerbau, kambing. Bahkan kandangnyapun disiapkan oleh BPBD di dekat pengungsian posko masyarakat tersebut. Hal itu diungkapkan oleh bapak haris dalam wawancaranya.

*“apa ituu sektor pternakan yang mana salah satu harta kekayaan masyarakat lereng merapi itu adalah hewan hewan ternak yang khususnya sapi dan kambing ini, semua pada saat masyarakat evakuasi , ternaknya juga kita evakuasi otomatis kita juga sediakan kandang kandang sementara yang berdekatan shelter atau barak pengungsian di ketiga titik tersebut.”*

(Wawancara Haris, Kabid.kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Bahkan BPBD mempersiapkan bagaimana hewan ternak itu bisa di cover oleh asuransi. Hal ini dikatakan oleh bapak wahyudi sebagai kabid rehab dan rekonstruksi. Namun hal tersebut belum

dapat titik terang sampai menjalin komunikasi dengan dinas peternakan maupun swasta.

*“ternak-ternak yang pernah kita bina ada tindak lanjutnya tidak sekarang merapi mau meletus lagi apa mereka bingung gimana permasalahannya bagaimana supaya bisa nyaman ngungsi bersama sapinya lagi ini misalnya, kayak gitu harus dirancang, saya sempat berpikir kalau misalnya menjalin hubungan dengan pihak swasta yang siap misalnya sebelum ada erupsi itu sapinya bisa dijual dengan harga yang baik misalnya, sekarang kami punya program pelatihan untuk para ternaknya kemudian saya coba nanti bisa di join kan kondisi darurat kira-kira ada yang mampu penjualannya atau enggak tapi emang agak sulit emang saya tanya tanya kemarin belum ada pengungsi yang fix tapi saya berpikir kalau bisa di cover oleh asuransi sampai saat ini belum titik terang, saya sudah menjalin dengan dinas peternakan itu salah satu kalau bencana merapi.”*

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Untuk sektor pertanianpun BPBD mencoba membantu bagaimana pertanian tersebut bisa di asuransikan. Karena kan dampak bencana terhadap pertanian itu bisa parah kerusakannya dan pertanian tersebut kan memang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seperti yang diungkapkan bapak wahyudi. Namun hal tersebut dinas pertanian sudah terlebih dahulu melakukan asuransi terhadap pertanian masyarakatnya.

*“respon kerugian terbesar yang di pertanian tapi ternyata pertanian sudah terasuransian masyarakat sudah dibilang oleh dinas pertanian mereka punya asuransi.”*

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)



Gambar 3.2 Pelatihan Relawan Desa  
(Dokumentasi BPBD kab.Klaten)

### 3. Desa Bersaudara

Untuk desa bersaudara atau pasaduluran ini diterapkan oleh BPBD Kab.Klaten buat wilayah mereka yang dekat dengan kawasan gunung merapi. Seperti yang dikatakan bapak haris terdapat 3 desa yang masuk wilayah klaten ini sebagai wilayah rawan bencana.

*“wilayah yang ada di kawasan rawan bencana 3 lereng merapi yaitu 3 desa, desa tegalmulyo, desa sidoredjo, desa balerante.”*

(Wawancara Haris Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

konsep dalam membentuk desa bersaudara ini adalah untuk beberapa desa di kabupaten Klaten yang termasuk sebagai kawasan

rawan bencana dan akan disaudarakan dengan desa terdekat yang tidak termasuk kawasan rawan bencana.

*“kabupaten klaten ini ada 3, jadi ada 3 desa kawan rawan bencana klaten, yang sebelah timur itu namanya desa tegalmulyo, desa tegal mulyo ini diarahkan untuk nanti ke shelter kebarak pengungsian di desa demak hijau kecamatan ngarangnongko, kemudian desa sidorejo itu posisi desa yg di tengah itu diarahkan nanti ke barak di desa menden kecamatan kebonarum, kemudian berikutnya yang paling barat itu perbatasan dengan kabupaten sleman yaitu desa balerante. ketiga desa itu semuanya di kecamatan kemalang, desa balerante nanti masyarakatnya kita arahkan shelter barak pengungsian di desa kebondalemalor kecamatan prambanan, jadi artinya semua sudah terencana.”*

(Wawancara Haris, Kabid kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Dari sini memang diharapkan bisa terjadi kerjasama yang baik antara desa tersebut. Dari desa yang dijadikan tempat buat posko barak pengungsian dengan desa yang di kategorikan kawasan rawan bencana mereka dapat menerima dengan terbuka seperti arti sebuah saudara. Selain itu bukan hanya tempatnya jadi pengungsian namun bisa mengurangi ke khawatiran masyarakat dan kepanikan dalam proses dimana mereka harus evakuasi. Yang lainnya adalah untuk memudahkan pemerintah dan lainnya dalam pelayanan pengungsi. Dan terakhir adalah memudahkan perangkat desa tetap menjalankan kerjanya.

*“satu hal yang kita kedepankan yaitu antara desa asal pengungsi ketiga desa tadi kita hubungkan kita saudarakan dengan desa dimana lokasi shelter itu berada. antara pemerintah desan beserta tokoh tokoh masyarakat di kedua desa ini kita saudarakan kita pertemukan kita koordinasikan yang dalam bahasa di klaten ini namanya desa*

*pasaduluran sama juga dengan desa lainnya. itu semua sebagai contoh untuk penanganan kedaruratan untuk erupsi merapi sama nanti prosedurnya yang jelas kita satu komando.”*

(Wawancara Haris Kabid.kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

## **C. Komunikasi dan Implementasi BPBD Kab.Klaten dalam Penanganan Bencana**

### **1. Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOPS)**

Pusdalops adalah suatu ruangan yang berisi alat-alat perangkat yang mendukung penanganan bencana BPBD Kab.Klaten.

*“Ada perangkat lunak, perangkat keras, ruangan, dan personel maupun manajemen di sana. Itu untuk menentukan langkah-langkah yang ada di sana.”*

(wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

seperti yang disampaikan pak haris pusdalops ini mengelola informasi data perkembangan atau apapun. Jadi dari informasi yang di dapat itu akan di sampaikan lagi ke publik.

*“nah di dalam bpbd itu ada namanya pusat pengendalian operasi (pusdalops), pusdalop ini yang mengelola informasi data perkembangan atau apapun, jadi data yang masuk itu kita kelola kita analisis kemudian kita sampaikan lagi.”*

(Wawancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Dalam tugasnya pusdalops ini di bagi tiga kegunaannya yaitu pada sebelum bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Pada sebelum bencana pusdalops BPBD Kab.klaten ini memberikan dukungan kegiatan bagi masyarakat, pada saat sebelum bencana apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ini berupa pengumpul, penyaji data, pengolah serta informasi kebencanaan secara rutin. Pada saat bencanapun pusdalops ini memberikan dukungan pada Posko barak kedaruratan yang sebelumnya sudah dibuat maupun dadakan dalam artinya pusdalops sebagai penyalur pusat informasi ketika barak posko pengungsian membutuhkan apa.

Lalu pelaksanaan kegiatan darurat, jadi pusdalops yang merupakan sebagai komando sekaligus menerima data semua kebencanaan disini. Seperti yang dikatakan pak haris semua data seperti korban jiwa, jumlah luka ringan dan lainnya ini akan dilarikan ke pusdalops.

*“komunikasi dan segala macamnya artinya begitu saat terjadi korban itu dari ini di lapangan ini dari sar tni-polri ini semua data akan dilarikan ke bpbd kapusdalops tadi yang mengendalikan operasi ini, jadi pusdalop ini menerima mengolah mesituasikan menyampaikan keluar lagi tentang informasi yang dipublikasikan secara resmi jadi informasi secara resmi dari pemerintah daerah ini khususnya di bpbd ini hasil tadi dari pusdalops.”*

(Wawancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Pasca Bencana memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi artinya wilayah yang terkena bencana alam tentunya wilayah tersebut akan dibangun kembali. Dalam membangun kembali tentu membutuhkan data kerusakan-kerusakan apa saja yang diakibatkan bencana dan disinilah pusdalops perannya sebagai informasi lengkap. Dalam BPBD Kab. Klaten sendiri menurut bapak wahyudi yang merupakan kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi mereka terjun langsung

pada saat bencana dan sekaligus mendata lokasi serta area terkena bagaimana lalu dibuat laporan yang namanya jitupasna.

*“pada masa kedaruratan pun kami memperbuat diri sambil melakukan pertolongan pertolongan darurat sampai logistik dan sebagainya bagaimana bencana merapi itu ditampung di shelter dan sebagainya kami sudah harus terjun disitu untuk mendata semuanya korbannya berapa lokasinya di mana dan area terkena bagaimana adjustment kami sudah lakukan di sana sehingga itu kami jadikan laporan secara menyeluruh dengan begitu nanti kita bisa buat laporan yang namanya jitupasna semacam kajian itu isinya jitupasna itu intinya adalah kita untuk melihat ya kerusakannya seberapa korbannya seberapa kemudian kerugian yang ditimbulkan berapa.”*

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Ada hal yang perlu diketahui bahwa dalam hal kerusakan yang diakibatkan bencana dengan kerugian. Bahwasannya kerusakan bisa berupa kerusakan konstruksi sarana dan prasarana, sedangkan kerugian adalah bisa diakibatkannya dari kerusakan tersebut sehingga membuat manusia tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Analoginya adalah seorang petani memiliki sawah, ketika banjir melanda sawah tersebut dan itu mengakibatkan sawah tersebut rusak, inilah yang membuat kerugian karena sawah tersebut merupakan mata pencaharian petani. Seperti yang dikatakan bapak wahyudi bahwasannya kerusakan dan kerugian itu beda karena beliau orang tehnik dan ini yang dipahami beliau.

*“agak beda ya antara kerusakan dan kerugian itu di kami itu agak beda dulu saya orang tehnik kerusakan-kerusakan tapi di sini harus melihat kerugian, kerugian itu bisa ditimbulkan kerusakan yang ada baik manusianya baik prasarannya baik rumah-rumahnya dampak kerusakan yang yang*



*ada itu kan akan menimbulkan kerugian dengan lain, misalnya saja satu jembatan putus karena banjir ya selama berapa waktu itu nanti akan dibangun dengan begitu orang akan mengakses jalan lain jalan pertanian dan itu akan menjadi nilai ekonomi sampai ke sana”*

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)



Gambar 3.3 Ruang Pusdalops  
(dokumentasi BPBD Kab.Klaten)

## **2. Pertemuan Relawan**

Relawan-relawan yang tersebar di Klaten itu jumlahnya sudah ada ratusan. Mereka ini jadi relawan atas dasar keinginan sendiri serta memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Banyak organisasi, komunitas maupun ormas besar di klaten memiliki tim relawan penanganan kebencanaan. Bahkan ormas besar seperti muhammadiyah mereka memiliki LPB lembaga penanggulangan bencana dan dilamnya banyak divisi bagian-bagiannya seperti evakuasi, dapur umum, kecelakaan air dan lainnya. Ini menandakan bahwa masyarakat diluar non pemerintah memiliki sumbangsih yang besar terhadap masyarakat lagi. Seperti yang dikatakan pak

haris beliau mengatakan saking banyaknya relawan beliau tidak terlalu banyak yang hafal nama-nama dari relawan ini, tetapi sudah tercatat di data BPBD Kab.Klaten.

*“sedang kan yang bener-bener jadi swasta partikelir yang tumbuh dari masyarakat macam-macam katakanlah seperti di sini ada yang namanya relawan semut geni relawan komunitas tanggap bencana relawan klaten timur, banyak mas jadi ada ratusan relawan kami terus terang tidak hafal, apa yang jelas yang gede itu boleh dikatakan yang punya lembaga-lembaga ormas misalnya lpb lembaga penanggulangan bencana muhammadiyah itu sangat mereka punya berbagai divisi yang itu mulai dari evakuasi kemudian dapur umum kemudian kecelakaan air kecelakaan gunung dan segala macam dan itu yang punya ormas muhammadiyah.”*

(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Dalam upaya mensinergikan pikiran antara BPBD Kab.Klaten dengan relawan-relawan kebencanaan dibutuhkan adanya pertemuan secara berkala. dalam arti setiap ada pembaruan teknis maupun ilmu baru dalam penanganan bencana harus ada sosialisasi dengan relawan tersebut. Bahkan lebih dari itu setiap pertemuan dengan relawan diharapkan bisa saling mengenal, lebih bersahabat antara pemerintah dengan non pemerintah. Seperti yang dikatakan Haris yang merupakan kabid kedaruratan dan logistik dan sekaligus komando dari bpbd kab.klaten dengan para relawan mengatakan mereka bisa melaksanakan pertemuan relewan 3 bulan sekali.

*“kami setiap 3 bulanan mengagendakan pertemuan rutin relawan sekabupaten klaten pertemuan 3 bulanan ini sebagai bagian untuk selalu mengkomunikasikan berbagai hal katakanlah mulai dari segi aturan kemudian dari*

*apa itu tingkat kerawanan bencana kemudian hal-hal peralatan yang kita buktikan dan semuanya jadi kita sifatnya untuk mengkomunikasikan secara aktif menjaga perasaan pemikiran dan pandangan ini dengan teman teman relawan yang mana sekali lagi saya sampaikan di lapangan ini relawan inilah yang luar biasa kontribusinya jadi begitu”.*

(wanwancara Haris Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

### **3. Pelatihan mitigasi Ke Sekolah, Puskesmas, Dunia Usaha, Dan Rumah Sakit.**

Pelatihan mitigasi yang dilakukan BPBD Kab.Klaten adalah meningkatkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat dalam menyelamatkan diri secara mandiri menghadapi bencana alam. Dan sarasanya selain desa pada bab diatas, mereka melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah mulai dari paud sampai sma sekolah menengah atas, selain itu ada instansi-instansi lainnya seperti puskesmas, rumah sakit, dunia usaha, seperti yang dikatakan asri.

*“terus ada kita juga beberapa pelatihan ke desa untuk pengurangan resiko bencana ada harus pelatihan ke sekolah, ssb, sekolah siaga bencana, pelatihan ke pra sekolah, jadi kalau yang di sampingnya kontor BPBD itu ada”.*

(wawancara Asri staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Ada beberapa materi mitigasi bencana ini untuk diajarkan, karena setiap bencana berbeda itu akan beda juga cara penyelamatannya bagaimana. Seperti gempa bumi misalnya, ketika kita sedang berada di gedung dan gempa bumi datang hal pertama yang kita lakukan adalah tutupi kepala lalu pergi ke sudut ruangan

gedung tersebut. Berbeda dengan tsunami datang, kita diharuskan lari ke patokan jalur evakuasi yang sudah disediakan pemerintah sebelumnya.

*“ Jadi buat anak pra sekolah, TK, paud, jadi pelatihan bencana buat anak-anak. Kalau gempa itu harus gimana adik-adik? Tutupi kepala, terus ada lari-lari gitu ke rumah gempa. Ada angin gimana, kalau banjir gimana, kasih film. Medianya banyak.”*

(Wawancara Asri, staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)



Gambar 3.4 Pelatihan Mitigasi Pelajar Sekolah  
(Dokumentasi BPBD Kab.Klaten)

#### 4. Unit Layanan Disabilitas

Unit layanan disabilitas ini merupakan peraturan tindak lanjut dari pusat yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomer 14 tahun 2014. Untuk mereka BPBD di wilayah kota maupun kabupaten mereka harus menerapkan program ULD ini. Di kabupaten klaten sendiri penyandang disabilitas ini cukup banyak bisa sampai belasan ribu. BPBD Kab.Klaten sendiri sebelumnya sudah mempunyai relawan disabilitas ini, namun

semenjak adanya ULD ini jadi membuat mereka lebih paham lagi ilmu penanganan bencana bagi penyandang disabilitas.

Menurut ibu asri yang merupakan bagian staff bid.pencegahan dan kesiapsiagaan mengatakan bahwa ULD ini diikuti relawan penyandang disabilitas yang lalu mereka dilatih bagaimana pertolongan pertama, evakuasi tekniknya, maupun micro teaching.

*“melalui pelatihan tersebut mereka diharapkan bisa memberikan pelajaran tentang PRB ini kepada penyandang disabilitas lainnya.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Dalam pelatihan waktu itu ada sekitar 25 orang penyandang disabilitas yang jadi sukarelawan. Disini mereka bagaimana diajarkan materi penanggulangan bencana dan disalurkan kembali ilmu ke masyarakat penyandang disabilitas lagi. Karena untuk bisa pahami apa saja kebutuhan mereka ya dari sesama penyandang disabilitas. Hal tersebut diutarakan oleh ibu asri.

*“itu dia kami memperhatikan mengapa relawan penyandang disabilitas ini dilatih wawasan penanganan bencananya dan serta sebelumnya memang datang dari kemauan mereka sendiri.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Penyandang disabilitas mereka ini tersebar berbagai tempat di daerah kabupaten Klaten. Serta kabupaten Klaten ini memang wilayah yang rawan dengan potensi berbagai jenis bencana, ntah itu erupsi merapi, puting beliung, banjir dan lainnya. Penyandang disabilitas ini memang paling rentan untuk risiko bencana.

*“kami punya datanya kelompok disabilitas ini memang ada tersebar di berbagai wilayah di klaten ini.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Untuk dari penanganan antara kelompok disabilitas dengan kondisi manusia yang biasa itu berbeda. Karena kan untuk penanganan disabilitas dibutuhkan teknis yang berbeda dan setiap disabilitas mempunyai karakter yang beda. Ini yang dijadikan dalam membuat sistem peringatan dini atau (EWS).

*“harus diketahui juga sih peringatan dini untuk tunanetra sama runtu kan berbeda ya mas. Jadi ya tentu juga dalam membuat EWS buat mereka ya harus disesuaikan.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Penekannya juga harus begitu, kalau kita pukul rata evakuasi dengan yang lainnya. Tentu ini membuat masalah baru buat penanganan bencana. Seperti yang dikatakan asri, dari segi posko atau shelter ini mereka harus menyiapkan tempat yang ramah buat disabilitas ini.

*“bisa dibayangin ga mas, pada saat kita evakuasi disabilitas ini contohnya kita angkat orangnya, sedangkan kusi rodanya tidak kita bawa? Ya jelas itu berbahaya kan. Jadi ya harus jadi satu bawanya.”*

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)



Gambar 3.5 Pelatihan Relawan Disabilitas  
(Dokumentasi BPBD Kab.Klaten)

## 5. Tim Reaksi Cepat

Dalam mengatasi sesuatu penanganan bencana dibutuhkan adanya suatu tim yang berisikan orang-orang kompeten dalam bidangnya untuk penanganan bencana. Dalam tim ini harus bisa memahami tugas dan sop yang disepakati sebelumnya dalam teknis kebencanaan. Dalam BPBD Kab.Klaten sendiri mereka memiliki tim yang namanya TRC tim reaksi cepat. TRC ini beranggotakan 31 orang dimana mereka dibagi beberapa shift bergiliran untuk standby ketika ada bencana alam datang. Seperti yang dikatakan bapak haris tim diharapkan bisa secara cepat kerjanya ketika informasi bencana datang.

*“tadi saya sampaikan cara formalnya bpbd ini punya unit yang itu langsung bergerak langsung ke pada saat darurat yang dinamakan trc tim reaksi cepat, tim reaksi cepat ini beranggotakan 31 orang atau satu peleton.”*

(Wawancara Haris, Kabid.Kedaruratan Dan Logistik, 31 agustus 2018)

Dalam teknisnya secara detail, tim TRC ini dalam 24 jam dibagi 3 shift bergantian. Satu shiftnya yaitu 8 jam, dalam masa shiftnya ketika ada bencana maupun tidak tetap mereka diharuskan dicatat dalam buku laporan dan berlaku juga untuk shift selanjutnya. Itu semua jelaskan oleh bapak haris.

*“31 orang ini dibagi tiga shift penugasan masing-masing 8 jam jadi di poskonya ini tim reaksi cepat itu selalu ada yang terjaga jadi piket, jadi tidak harus 31 orang itu berjaga semua, nggak. artinya ada 5,6 itu setiap katakanlah ini jam jam jaganya mulai jam 07.00 sampai jam 15.00 8 jam kan itu diisi 5 sampai 6 orang ya udah jadi pada saat jam 15 pergantian shift nah penyerahan katakanlah hasil selama 8 jam di pagi ini melaporkan misalkan situasi aman terkendali atau kan misalkan ada terjadi apa dan semua dicatat dalam buku buku laporan kejadian nah nanti tim berikutnya bekerja itu nanti pada saat selesai jadi tidak akan terputus komunikasinya.*

*(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)*

Untuk tugas dan fungsinya sendiri mereka akan mengkoordinasikan langsung dengan relawan-relawan terdekat dengan lokasi bencana. serta menganalisis bencana yang terjadi itu apa, lalu mendata logistik yang dibutuhkan apa saja serta mengevakuasi masyarakat ke wilayah yang aman dan sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang dikatakan bapak haris.

*“melakukan pengkajian tentang jenis bencana dampak bencana kerugian bencana kerugian jiwa kerugian harta dan juga kajian kebutuhan yang dibutuhkan hal-hal dibutuhkan untuk penanganan kedaruratan jadi pada saat terjadi bencana kami bpbd itu langsung menegaskan tim reaksi cepat itu untuk langsung secepat-cepatnya turun lapangan dan melakukan kajian tadi kajian tentang jenis dampak bencana korban jiwa kerugian harta benda dan sejenisnya serta hal-hal kebutuhan apa*



*saja yang harus dipenuhi secepat-cepatnya pada saat kondisi darurat.”*

(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Seperti yang dijelaskan paragraf diatas, TRC ini melakukan koordinasi dengan relawan-relawan yang dekat dengan lokasi bencana. Mereka ini sudah saling kerjasama antara pemerintah dengan non pemerintah serta BPBD sendiri mempunyai data daftar relawan tersebar se kabupaten klaten. Tentu dalam penanganan pemerintah tidak bisa sendiri dan butuh dukungan relawan inilah dalam membantu penanangan bencana yang cepat. Hal ini diutarakan Haris sebagai kabid kedaruratan dan logistik.

*“kemudian pada saat penanganan di lapangan tim reaksi cepat atau trc ini tadi sudah punya jaringan lembaga lembaga relawan yang mana itu tumbuh pesat di masyarakat artinya kita kan punya bank data database relawan relawan yang ada di klaten artinya pada saat tim reaksi cepat ini turun ke lapangan mereka pun langsung refleksi akan mengontak relawan lembaga relawan di lokasi bencana yang bersangkutan katakanlah di kecamatan x ini terjadi misalnya bencana angin ribut langsung menuju secepat-cepatnya ke lokasi tempat kejadian di dalam perjalanan ke sana itu langsung kontak lembaga atau sukarelawan yang ada di lokasi tersebut jadi prinsipnya begitu.”*

(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Selain itu pemerintah tidak serta merta hanya BPBD saja untuk urusan kebencanaan, mereka bahkan mempunyai SAR search and rescue. SAR ini dibentuk untuk spesialisasi pencarian korban bencana alam dan pertolongan. Yang lainnya adalah Istana PMI Taruna Siaga Bencana serta ada dari TNI, Kepolisian, mereka

inilah dari pemerintah untuk bantu bersama dengan BPBD Kab.Klaten. Tapi dalam urusan komando dalam kebencanaan tetap dipegang oleh BPBD Kab.Klaten sendiri, seperti yang diungkapkan Haris.

*“Oke jadi misalnya korban jiwa , ini kan yang pertama akan pertama duluan maju itu adalah sar search and rescue SAR kan yang memang lebih banyak titik fokusnya di tim penyelamatan dan pencarian oke di dalam prakteknya di dalam tugasnya dalam operasinya sar pastinya akan mempunyai komando yaitu bpbd kemudian dibantu oleh tni polri kemudian relawan apa itu komunikasi dan segala macamnya artinya begitu saat terjadi korban itu dari ini di lapangan ini dari sar tni-polri ini semua data akan dilarikan ke bpbd ke pusdalops tadi yang mengendalikan operasi ini.”*

(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

#### **D. Evaluasi Program Penanganan Bencana BPBD Kab.Klaten**

Dalam menentukan evaluasi program tentunya membutuhkan data yang akurat dari internal. Itupun berlaku bagi evaluasi program penanganan bencana terutama BPBD Kab.Klaten. Mereka mempunyai yang namanya jitupasna, apa itu jitupasna adalah semacam mengaudit atau bahasa ringannya adalah menghitung. Apa saja yang dihitung dalam jitupasna itu melingkupi berupa data korban yang meninggal, luka berat, luka ringan lebih dalam lagi sebenarnya dalam mengklasifikasikan masyarakat yang korban dari bencana alam. Selain itu menghitung area terkena dampak dari bencana alam itu bagaimana. Melingkupi infrastruktur umum, sekolah, rumah, dll. Selain itu adalah menilai bencana alam tersebut bagaimana bisa terjadi secara ilmiah apa penyebabnya dan bagaimana teknis terjadinya. Seperti yang dikatakan

Ahmad yang merupakan kabid rehabilitasi dan rekonstruksi beliau sudah terjun langsung pada saat terjadi bencana.

*“pada masa kedaruratan pun kami memperbuat diri sambil melakukan pertolongan-pertolongan darurat sampai logistik dan sebagainya bagaimana (masyarakat) bencana merapi itu ditampung di shelter dan sebagainya kami sudah harus terjun disitu untuk mendata semuanya, korbanya berapa, lokasinya dimana dan area terkena bagaimana. Adjustment kami sudah lakukan di sana sehingga itu kami jadikan laporan secara menyeluruh dengan begitu nanti kita bisa buat laporan yang namanya jitupasna.”*

(wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Dari setelah bencana alam yang besar terjadi misalnya bencana gunung merapi maupun gempa pasti akan ada dampaknya terhadap prasarana dan sarana. Ini lah yang dipikirkan masyarakat terutama pemerintah untuk bagaimana membangun kembali wilayah tersebut. Dalam hal ini juga BPBD Kab.klaten terutama bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki tugas selain pemulihan healing atau trauma di masyarakat mereka membuat rencana aksi atau disingkat renaksi ini menyusun 3, 4 tahun setelah pasca bencana. seperti yang diungkapkan Wahyudi bahwa selain prasarana dari sisi sektor ekonomi juga kita memikirkan pemulihannya.

*“Itu cara berpikir kami seperti itu belum lagi pemulihan ekonominya belum lagi pemulihan trauma healing nya itu ya yang kami lakukan di situ membangun sosial ekonomi seiring dengan prasarana jadi bangun itu seperti apa setelah itu kami susun dalam jitupasna itu yang disebut dengan ren aksi rencana aksi ya itu bisa 3 tahun sampai 4 tahun setelah pasca bencana itupun seperti merapi sekarang ada kekurangan yang disana yang bisa kami lakukan. misalnya jalur evakuasi sekarang perlu dibangun lagi kemudian dulu ternak-ternak yang pernah kita bina ada tindak lanjutnya tidak sekarang merapi mau meletus lagi apa mereka bingung gimana permasalahannya bagaimana supaya bisa nyaman ngungsi bersama sapinya lagi ini misalnya, kayak gitu harus dirancang, saya sempat berpikir kalau misalnya menjalin hubungan dengan pihak swasta yang siap misalnya sebelum ada erupsi itu sapinya bisa dijual dengan harga yang baik misalnya”*

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Untuk teknis bantuan dari luar ketika pasca bencana menimpa klaten, seperti organisasi NGO menangani pemulihan healing dan trauma dan organisasi-organisasi relawan lainnya mereka diharuskan berkoordinasi dengan BPBD Kab.Klaten yang sebagai komando utama penanganan Bencana kabupaten Klaten.

*“ Pada saatnya terjadinya bencana, biasanya nanti akan ada baik itu NGO atau bantuan dari luar yang memang spesialisasinya seperti itu. Semua kalau bantuan dari luar harus koordinasi dengan BBPD.”*

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

### **1. Hambatan dan Kritik Atas Pola Komunikasi Penanganan Bencana**

Dari semua data wawancara yang peneliti dapat, menemukan beberapa hambatan di pola komunikasi informasi yang terdapat di masyarakat sendiri. Peredaran informasi yang sangat cepat karena ditunjang dengan media sosial bisa oleh masyarakat sendiri. hal ini terkadang yang membuat baik dalam penyebaran informasi kebencanaan secara cepat namun disisi lain dapat juga informasi tersebut tidak valid.

Kenapa penyebaran informasi dari masyarakat tidak valid karena mereka tidak serta merta dahulu untuk teliti dalam menangkap berita. Karena dibutuhkan sumbernya dari mana, apakah sumber tersebut resmi dari pemerintah, yang lainnya adalah waktu kejadian dan lokasi kejadian. Masyarakat sendiri masih suka panik ketika menerima informasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Asri.

*“jadi sudah sangat dinamis model komunikasinya, karena media perkembangan zaman. Disini*

*terkadang masyarakat suka salah menyebarkan informasi tersebut.”*

(Wawancara Asri, staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan data peneliti peroleh didapatkan namun memang ini hambatan yang berbeda bahwa pengalaman sebelumnya BPBD sulit untuk mengevakuasi masyarakatnya karena berdalih mereka ingin mengungsi dengan ternaknya. Hal ini menjadi perhatian pada saat itu yang membuat BPBD sebuah solusi dengan membuat kandang sementara di barak pengungsian desa peseduluran.

*“iyah waktu itu kamu menemui kesulitan, karena toh masyarakatnya bersikeras ingin dengan ternaknya dibawa sekalian untuk mengungsi.”*

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Ada sisi menarik bagi peneliti yaitu warga yang disekitar KRB atau kawasan rawan bencana ini mereka masyarakatnya makmur. Terlihat dari mereka memiliki kendaraan bahkan truk yang lumayan banyak, hal itu dituturkan oleh Wahyudi bahwa masyarakat tersebut meminta lahan parkir untuk kendaraan pada saat evakuasi.

*“jadi mereka bisa evakuasi secara mandiri karena sekarang daerah makmur, daerah merapi tuh sekarang daerah makmur , karena jualan pasir di sana batu sekarang ini bisa dikasih contoh ya satu desa panggang satu itu saja tidak terlalu besar daerah ke atas sana itu punya truk 1 desa punya 50.*

*itu belum menyangkut banyak segitu itu jangan heran mereka mengungsi pakai pajero ya begitu situasinya bisa begitu pada saat kita suplai makanan misalnya belum tentu mereka cocok sebab nyawa juga.”*

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas temuan yang sudah di dapat selama penelitian di BPBD Kab.Klaten. Ada banyak yang di dapat temuan oleh peneliti seperti bagaimana situasi permasalahan kab klaten dalam menangani bencana, tugas pemerintah dalam penanganan bencana, penanggung jawab bencana, lalu program dan perencanaannya seperti apa, bagaimana BPBD Kab.Klaten melaksanakan komunikasi dan implementasi, yang lainnya evaluasi program yang sudah dilaksanakan BPBD seperti apa. Untuk itu sesuai dengan rumusan masalah yang penulis susun yaitu bagaimana manajemen komunikasi BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana serta faktor pendukung dan penghambat dari penanganan bencana tersebut.

Sesuai dengan rumusan masalah peneliti ingin mengupas bagaimana manajemen komunikasi yang dilakukan oleh BPBD sendiri dalam penanganan bencana. Maka dari itu sesuai dengan kerangka konsep peneliti menganut (Iestari, 2006 :199) yaitu kerangka konsep manajemen komunikasi bencana. Lalu untuk lebih dalam lagi dari manajemen komunikasi bencana BPBD Kab.Klaten tersebut dari kelebihan dan kekurangan, maka peneliti akan menggunakan konsep analisis SWOT.

#### **A. Analisis Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana**

Dalam memetakan konsep manajemen komunikasi BPBD Kab.Klaten peneliti membaginya dalam 4 kategori. Yang pertama adalah kepemimpinan pengendalian, dalam suatu manajemen membutuhkan suatu pemimpin dalam menentukan perencanaan dan evaluasi koordinasi serta dapat memotivasi anggotanya. Yang kedua adalah perencanaan seperti apa yang dilaksanakan pemimpin BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana bersama anggotanya, disini melingkupi efektivitas, sumber daya dan penanggulangan bencana. Yang ketiga adalah organizing BPBD dan kerjasama mitra dalam penanganan bencana. Yang keempat adalah evaluasi dan koordinasi. Dan berikut analisis peneliti :

## **1. Kepemimpinan BPBD Kab.Klaten dalam Pengendalian Bencana di Kabupaten Klaten**

Sesuai dalam peraturan daerah kabupaten klaten nomer 8 tahun 2011 pada bab 4 pasal 6 mengatakan bahwa kepala BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Kenapa pemilihan kepala pelaksana BPBD itu dijabat oleh sekretaris daerah alesannya adalah karena sekretaris daerah ini memiliki koneksi ke semua elemen masyarakat maupun aparatur daerah dan powernya itu bisa menggerakkan elemen masyarakat tersebut. Ini akan memudahkan BPBD dalam mensinergikan visi dan misi penanganan bencana yang diambil dengan elemen masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan untuk menyebarkan informasi bencana terhadap publik ini menjadi tugasnya pimpinan kepala pelaksana. Namun tentu kepala pelaksana ini memiliki data dari pusdalops pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana yang dimana pusdalops ini adalah mengelola informasi data perkembangan atau apapun kebencanaan jadi data yang masuk itu mereka kelola lalu di analisa kemudian di sampaikan ke publik. Secara unit pudalops ini di kepalai oleh kepala bidang Kedaruratan dan Logistik.

Salah satu contoh yang terjadi masyarakat di wilayah dekat merapi atau kawasan KRB kawasan rawan bencana mereka pernah panik ketika gunung merapi meletus. Mereka panik karena berspekulasi tipe merapi meletus ini antara magmatik, freatik atau eksposif. Dengan ditambah saluran informasi yang cepat

Seperti yang di dapat peneliti dari data bahwa BPBD Kab.Klaten sendiri memiliki standar operating prosedur atau disingkatnya (SOP) dalam menangani setiap tipe bencana yang berbeda. Jadi bencana yang berbeda ini memiliki SOP tersendiri-sendiri. Dalam contoh kasus daiatas seputar gunung merapi meletus BPBD Kab.Klaten yang pertama dilakukan adalah



relawan-relawan yang berada di wilayah tersebut mereka akan pegang dulu. Di perbanyak koordinasi kesana sehingga penduduk wilayah disana tidak termakan arus informasi yang salah tentang gunung merapi.

Untuk mempermudah komunikasi koordinasi BPBD dengan wilayah kawasan rawan bencana (KRB) mereka menggunakan media gadget whatsapp selain itu mereka meberikan sebuah radio repiter atau HT kepada relawan utama di wilayah tersebut. Selain BPBD Kab.Klaten penduduk di wilayah tersebut dapat memiliki akses dengan BPPTKG yang bewenang dalam menentukan status bencana. Ketika suatu bencana yang tergolong besar dan dikira kurang mampu diatasi BPBD Kab.Klaten mereka tidak sungkan meminta bantuan BPBD tetangga seperti Boyolali.

## **2. Perencanaan Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Pada Masa Normal dan Masa Tanggap Darurat**

### **a. Masa Normal**

Dalam perencanaan komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kab.Klaten terdapat program-program bagaimana mereka melakukan penanggulangan bencana terhadap masyarakat. Adapun pengertian perencanaan menurut Lestari (2011: 96-98) adalah menyusun segala hal-hal yang diperlukan untuk dipikirkan secara matang sebelum dilaksanakan penerjunan lapangan, hal ini guna untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun perencanaan yang dibuat BPBD Kab.Klaten mereka membuat khusus perencanaan untuk pada masa normal dan masa tanggap darurat.

Pengertian masa normal adalah dimana suatu wilayah yang termasuk rawan bencana tidak terindikasi bencana akan datang ke wilayah tersebut. Indikatornya untuk menentukan wilayah tersebut keadaan normal adalah dibantu badan peneliti yang berwenang menentukan langsung keadaan wilayah tersebut normal atau tidak. Dalam hal ini BPBD Klaten berkoordinasi dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTG) untuk

menginformasikan wilayah mana yang dikategorikan memiliki potensi bencana maupun tidak. Sedangkan tanggap darurat adalah masa dimana bencana telah terjadi dan BPBD Kab.Klaten pun telah menyiapkan bagaimana teknis respon cepat terjun langsung menangani ke wilayah terkena bencana. Untuk hal ini mereka mengkoordinasikan dengan berbagai stakeholder.

Untuk perencanaan manajemen komunikasi itu seperti 5w+1h mesti jelas dari tindakan apa yang harus dijelaskan, apakah sebabnya tindakan tersebut, dimanakah tindakan itu harus dikerjakan, kapankah tindakannya, siapakah yang mengerjakan rencana tersebut, bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu, hal tersebut diungkapkan lestari puji (2011:96).

Dalam menentukan situasi pra bencana peneliti mendapati dari Arimastuti (*Jurnal Penanggulangan Bencana*, No. 2, 2008: 15-23) Penelitian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa peneliti menemukan pada tim COMPRESS LIPI, mereka ada kesamaan dengan pendapat cutlip dan center yang menekankan pada situasi pra tsunami dengan menggunakan yang pertama yaitu pencarian fakta, perencanaan, berkomunikasi, dan evaluasi.

Selanjutnya sesuai konsep tersebut yang pertama tindakan apa yang dikerjakan BPBD Kab.klaten dalam masa normal penanganan bencana dan sesuai data yang di dapat peneliti akan uraikan dibawah :

Yang pertama adalah sekolah sungai, arti penting sekolah sungai itu adalah menghasilkan relawan yang dapat memiliki sungai binaan. Disamping itu, kegiatan mereka akan berfokus pada upaya penyadaran masyarakat terkait pentingnya merawat sungai. Ini salah satu program BPBD Kab.Klaten dalam urusan menjaga sungai-sungai mereka dari pencemaran dan ingin mensinergikan dengan masyarakat atau tugas bersama. perlu diketahui sekolah sungai ini dikepalai oleh sekretaris daerah kabupaten klaten.

Yang kedua adalah DESTANA desa tangguh bencana Destana adalah program dimana suatu desa mereka diajarkan

bagaimana evakuasi, bagaimana mereka dilatih cara penanganan menghadapi macam-macam bencana ini seperti apa, serta mereka memiliki alat pendukung penanganan bencana semacam HT alat komunikasi, akses jalan evakuasi, transportasi.

Dalam mensukseskan program destana ini perlu adanya dukungan dari tokoh masyarakat daerah tersebut. Seperti halnya Badri (*Jurnal Komunikasi Pembangunan*, No. 1, Februari 2008: 55-71) menyebut berdasarkan keaktifan dan partisipasinya di masyarakat, ketokohan yang banyak berperan yaitu tokoh sosial. Pemuka pendapat merespons positif opini yang berkembang di masyarakat serta mendukung penanganan bencana yang dilakukan pemerintah dan LSM. Dari situlah bagaimana BPBD Kab.Klaten dengan desa sasaran yang dibidik program destana ini mereka harus berkoordinasi dengan tokoh setempat.

Yang ketiga adalah Desa bersaudara atau pesuduluran ini merupakan program untuk beberapa desa di kabupaten Klaten yang termasuk sebagai kawasan rawan bencana dan akan disaudarakan dengan desa terdekat yang tidak termasuk kawasan rawan bencana. Dari desa yang dijadikan tempat buat posko barak pengungsian dengan desa yang di kategorikan kawasan rawan bencana mereka dapat menerima dengan terbuka seperti arti sebuah saudara. Selain itu bukan hanya tempatnya jadi pengungsian namun bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat dan kepanikan dalam proses dimana mereka harus evakuasi. Yang lainnya adalah untuk memudahkan pemerintah dan lainnya dalam pelayanan pengungsi. Dan terakhir adalah memudahkan perangkat desa tetap menjalankan kerjanya.

Dari program ke dua dan ke tiga tersebut yaitu program Destana dan Desa Bersaudara ini diperuntukan untuk kawasan rawan bencana (KRB) di Kab.Klaten. Terdapat 3 wilayah desa yaitu Desa Tegalmulyo, Desa Sidoredjo, Desa Balerante. Desa bersaudara atau pesuduluran ini merupakan program untuk beberapa desa di kabupaten Klaten yang termasuk sebagai kawasan rawan bencana dan akan disaudarakan dengan desa terdekat yang tidak termasuk kawasan rawan bencana. Dari

desa yang dijadikan tempat buat posko barak pengungsian dengan desa yang di kategorikan kawasan rawan bencana mereka dapat menerima dengan terbuka seperti arti sebuah saudara. Selain itu bukan hanya tempatnya jadi pengungsian namun bisa mengurangi ke khawatiran masyarakat dan kepanikan dalam proses dimana mereka harus evakuasi. Yang lainnya adalah untuk memudahkan pemerintah dan lainnya dalam pelayanan pengungsi. Dan terakhir adalah memudahkan perangkat desa tetap menjalankan kerjanya.

Yang keempat lainnya yaitu BPBD mengadakan pelatihan mitigasi yang dilakukan BPBD Kab.Klaten adalah meningkatkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat dalam menyelamatkan diri secara mandiri menghadapi bencana alam. Dan sasarannya selain desa pada bab diatas, mereka melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah mulai dari paud sampai sma sekolah menengah atas, selain itu ada instansi-instansi lainnya seperti puskesmas, rumah sakit, dunia usaha, seperti yang dikatakan asri.

Ada beberapa materi mitigasi bencana ini untuk diajarkan, karena setiap bencana berbeda itu akan beda juga cara penyelamatannya bagaimana. Seperti gempa bumi misalnya, ketika kita sedang berada di gedung dan gempa bumi datang hal pertama yang kita lakukan adalah tutupi kepala lalu pergi ke sudut ruangan gedung tersebut. Berbeda dengan tsunami datang, kita diharuskan lari ke patokan jalur evakuasi yang sudah disediakan pemerintah sebelumnya.

Peneliti menilai bahwa dari program pelatihan mitigasi ini sesuai dengan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam amanat peraturan daerah. pelatihan mitigasi juga merupakan kegiatan pada pra bencana yang artinya menyiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana apapun. Dan ini sesuai masuk dalam konsep perencanaan yang peneliti ambil.

Yang ke lima adalah BPBD pun memperhatikan masyarakat penyandang disabilitas. Mereka memberi nama program tersebut adalah Unit layanan disabilitas (ULD), ini merupakan peraturan tindak lanjut dari pusat yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomer 14

tahun 2014. Untuk mereka BPBD di wilayah kota maupun kabupaten mereka harus menerapkan program ULD ini. Di kabupaten klaten sendiri penyandang disabilitas ini cukup banyak bisa sampai belasan ribu. BPBD Kab.Klaten sendiri sebelumnya sudah mempunyai relawan disabilitas ini, namun semenjak adanya ULD ini jadi membuat mereka lebih paham lagi ilmu penanganan bencana bagi penyandang disabilitas.

Unit layanan disabilitas ini bisa digambarkan sebagai sebuah kelompok yang dimana diharapkan input dan output ULD dalam penanganan bencana efektif. Seperti halnya Badri (*Jurnal Komunikasi Pembangunan*, No. 1, Februari 2008: 55-71) menyebut keragaan kelompok memiliki rataan skor tinggi, terutama kekompakan kelompok, suasana kelompok dan tujuan kelompok. Kondisi ini menunjukkan keberadaan kelompok masyarakat sangat penting untuk mendukung kegiatan penanganan bencana.

Menurut Asri yang merupakan bagian staff Bid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa ULD ini diikuti relawan penyandang disabilitas yang lalu mereka dilatih bagaimana pertolongan pertama, evakuasi tekniknya, maupun micro teaching. Peneliti menilai bahwa Unit layanan disabilitas di masukan ke kategori perencanaan adalah hampir sama dengan pelatihan mitigasi bencana namun berbeda penerapan yang diajarkannya.

kelima program tersebut merupakan dari beberapa program lainnya dan memang diharapkan BPBD Kab.klaten meminimalisir dampak yang lebih besar dari dampak bencana. Disini peneliti menilai bahwa dari 5 program tersebut adalah program yang sesuai bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dari berbagai aspek.

#### **b. Masa Tanggap Darurat**

Pada masa tanggap darurat BPBD Kab.Klaten memiliki beberapa perencanaan dalam upaya secara maksimal menangani bencana di wilayah Klaten. Adapun program-program maupun membuat sebuah tim yang dimiliki BPBD

dalam bertujuan menangani masa tanggap darurat. Untuk itu peneliti akan bahas dibawah ini beberapa perencanaan yang di lakukan BPBD Kab.Klaten dalam masa tanggap darurat :

Yang pertama adalah Pusdalops, dalam tugasnya pusdalops ini di bagi tiga kegunaannya yaitu pada sebelum bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Pada sebelum bencana pusdalops BPBD Kab.klaten ini memberikan dukungan kegiatan bagi masyarakat, pada saat sebelum bencana apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ini berupa pengumpul, penyaji data, pengolah serta informasi kebencanaan secara rutin. Pada saat bencanapun pusdalops ini memberikan dukungan pada Posko barak kedaruratan yang sebelumnya sudah dibuat maupun dadakan dalam artinya pusdalops sebagai penyalur pusat informasi ketika barak posko pengungsian membutuhkan apa. Lalu pelaksanaan kegiatan darurat, jadi pusdalops yang merupakan sebagai komando sekaligus menerima data semua kebencanaan disini. Seperti yang dikatakan pak haris semua data seperti korban jiwa, jumlah luka ringan dan lainnya ini akan dilarikan ke pusdalops.

Peneliti menilai bahwa pusdalops ini di masukan kategori perencanaan tanggap darurat adalah karena bisa sebagai suatu unsur data informasi kebencanaan dalam menentukan kebijakan tanggap darurat bencana.

Yang kedua adalah membuat sebuah tim, dalam mengatasi sesuatu penanganan bencana dibutuhkan adanya suatu tim yang berisikan orang-orang kompeten dalam bidangnya untuk penanganan bencana. Dalam tim ini harus bisa memahami tugas dan SOP yang disepakati sebelumnya dalam teknis kebencanaan. Dalam BPBD Kab.Klaten sendiri mereka memiliki tim yang namanya TRC tim reaksi cepat. TRC ini beranggotakan 31 orang dimana mereka dibagi beberapa shift bergiliran untuk standby ketika ada bencana alam datang. Seperti yang dikatakan bapak haris tim diharapkan bisa secara cepat kerjanya ketika informasi bencana datang.

Dalam teknisnya secara detail, tim TRC ini dalam 24 jam dibagi 3 shift bergantian. Satu shiftnya yaitu 8 jam, dalam masa shiftnya ketika ada bencana maupun tidak tetap mereka

diharuskan dicatat dalam buku laporan dan berlaku juga untuk shift selanjutnya. Itu semua jelaskan oleh Haris kabid.kedaruratan dan logistik.

Seperti yang dijelaskan paragraf diatas, TRC ini melakukan koordinasi dengan relawan-relawan yang dekat dengan lokasi bencana. Mereka ini sudah saling kerjasama antara pemerintah dengan non pemerintah serta BPBD sendiri mempunyai data daftar relawan tersebar se kabupaten klaten. Tentu dalam penanganan pemerintah tidak bisa sendiri dan butuh dukungan relawan inilah dalam membantu penanganan bencana yang cepat. Hal ini diutarakan Haris sebagai kabid kedaruratan dan logistik. Peneliti memasukan kebijakan membuat sebuah tim reaksi cepat ini ke dalam perencanaan karena salah satu unsur penanganan bencana.

### **3. Organizing BPBD Kab.Klaten dan Kerja Sama (Kemitraan) Dalam Penanganan Bencana**

Pengorganisasian adalah suatu struktur pembagian wilayah kerja yang dimana di setiap bidang divisi bakal diisi dengan orang-orang yang kompeten. Seperti Lestari (2011: 96-98) menuturkan bahwa pengorganisasian ini merupakan hal yang paling perlu dimana proses penempatan pembagian kerja yang sesuai dengan setiap orang yang memiliki kemampuan tersebut.

Hubungannya dengan BPBD Kab.Klaten adalah mereka membutuhkan yang namanya pengorganisasian ini, di dalam BPBD karena untuk menangani bencana ada berbagai bidang yang harus dimiliki. Selanjutnya peneliti akan bahas dibawah ini pengorganisasian yang dibangun oleh BPBD Kab.Klaten :

kepala badan yaitu sekretaris daerah Klaten, dibantu Kepala unsur pelaksana, sekretariat yang dibagi tiga sub antara lain :  
1.sub bagian perencanaan dan pelaporan, 2. Sub bagian keuangan, 3. Sub bagian umum dan kepegawaian. Lalu selanjutnya ada 3 bidang yang krusial dalam penanganan bencana yaitu : 1. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2. Bid. Kedaruratan dan Logistik, 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Di dalam pengorganisasian BPBD KAB.Klaten terdapat 3 bidang yang peneliti pilih dalam mengambil data karena ke tiga bidang ini lah yang terkait utama dalam penanganan bencana. Mulai dari pra bencana tentu ini bagian dari Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang kedua bagian dimana pas bencana yaitu Bid. Kedaruratan dan Logistik dan yang terakhir bagian pasca bencana yaitu Bid. 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Di ketiga bidang tersebut tentu terdapat staff seksi yang membantu kepala bidangnya. namun dalam kerjanya mereka tidak bekerja sendiri ada dimana mereka saling bekerjasama seperti pada pas bencana.

Lebih jauh lagi peneliti mendapati dari data yang di dapat untuk ke tiga bidang tersebut akan dibahas tugasnya seperti apa. Yang pertama adalah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang ini lebih menitik fokuskan pada masa pra bencana, jadi mereka menyiapkan kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, pencegahan lalu menyiapkan pemberdayaan masyarakat. Lalu bidang tersebut di bagi dua seksi yaitu seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan. Tentu ke dua seksi tersebut pun tugasnya berbeda pelaksanaannya.

Yang kedua yaitu bidang kedaruratan dan logistik bidang ini bekerja utama pada saat terjadi bencana. Mereka sebagai komando dalam masa tanggap darurat serta mengkoordinasikan dengan berbagai stakeholder dan tidak lupa bahwa mereka juga menyiapkan logistik. Bidang ini juga dibagi dua seksi yaitu seksi kedaruratan dan seksi logistik tentu juga tugasnya mereka berbeda.

Yang ketiga adalah bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, mereka bekerja pada saat sesudah bencana selesai atau pasca bencana. Mereka berkoordinasi dengan berbagai pihak menyiapkan kebijakan penanggulangan bencana. Bidang ini juga di bagi 2 seksi yaitu seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi. kedua bidang ini memiliki tugas yang berbeda contohnya seksi rehabilitasi mereka menyiapkan seperti pedoman teknis, standart perencanaan, kebijakan, laporan segala macam lainnya. Dan seksi rekonstruksi tentu hampir sama dengan rehabilitasi teknisnya namun lebih kepada rekonstruksi.

Terdapat beberapa pengambilan keputusan penting BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana. Mulai dari program



perencanaan seperti apa yang dipakai, komunikasi dan implementasi untuk penanganan bencana, dan evaluasi program. Dari hal tersebut tentu ada bagian yang memimpin masing-masing rangkaian penanganan bencana mulai dari pra bencana, pas bencana dan pasca bencana.

Di dalam organisasi pastinya ada dimana mengadakan komunikasi agar ada pemahaman yang sama antara internal maupun eksternal. Dan BPBD Kab.klaten pun memperhatikan ini

Untuk mitra BPBD Kab.Klaten seperti relawan-relawan yang tersebar di klaten mereka sering mengadakan pertemuan relawan 3 bulan sekali. Dari pertemuan itu terjadi adanya komunikasi yang dibangun antara BPBD dengan relawan. BPBD menginginkan sepemahaman visi dan misi mereka dengan relawan dalam penanganan bencana. mengkomunikasikan secara aktif menjaga perasaan pemikiran dan pandangan. Adapun ilmu-ilmu yang baru dalam penanganan bencana maupun setiap ada pembaruan teknis baru dalam penanganan bencana mereka bicarakan.

Perencanaan selanjutnya adalah di wilayah koordinasi dengan stakeholder lainnya. Dalam upaya penanganan bencana dibutuhkan koordinasi di wilayah Kab.Klaten, mereka sangat memperhatikan berbagai aspek dalam mensinergikan dengan masyarakat, aparatur negara seperti lembaga-lembaga Sipil, TNI, POLISI dan lainnya. Dan dibawah ini peneliti akan uraikan 10 sektor penanganan yang dilakukan BPBD Kab.Klaten :

1. Yang pertama adalah sektor posko, disini yang bertugas dan wewenangnya di pegang langsung oleh BPBD Kab.Klaten. untuk menyiapkan posko induk darurat, jadi ini sudah dipersiapkan betul bagaimana orang-orang yang dipilih dan kompeten serta teknis manajemennya lalu koordinasinya bagaimana.
2. Selanjutnya yang kedua adalah sektor pendidikan, sektor tersebut di koordinasikan oleh dinas pendidikan kab.klaten. karena pendidikan itu harus tetap berjalan. Dinas pendidikan pun menyiapkan sekolah darurat bagi masyarakat terkena bencana. Untuk itu dalam rangka menyepakati pihak-pihak terkait dengan sektor kesehatan pada saat terjadi penanganan

pengungsian shelter di barak pengungsian maka didirikanlah proses kegiatan pendidikan.

3. Kemudian yang ke tiga sektor kesehatan, yang mana itu merupakan kebutuhan yang penting bahawasannya setiap bencana akan menelan korban maupun tidak bagi setiap pengungsi atau siapapun. Dan ini dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kab.klaten yang dibantu oleh anggotanya kebawah seperti puskesmas, rumah sakit dan lainnya. Dalam masa kejadian bencana, pengobatan, pelayanan dan pertolongan bagi masyarakat terdampak tidak akan dipungut biaya alias gratis. kemudiian sektor kesehatan yang mana itu merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap pengungsi atau siapapun.
4. kemudian yang ke empat yaitu sektor evakuasi, dikoordinasikan oleh BPBD Kab.Klaten. BPBD ini lah yang nantinya mengkoordinasi dengan masyarakat terkait atas segala hal angkutan transportasi bagi masyarakat untuk evakuasi. Belum lagi jalur-jalur jalan evakuasi bagi masyarkat buat evakuasi. Disisi lain masyarakat pada kawasan rawan bencana untuk transportasinya sendiri mereka boleh dikatakan mencukupi, karena mereka mempunyai kendaraan pribadi sendiri.

Evakuasi ini merupakan sektor yang mengkaitkan berbagai pihak dalam rangka untuk mengajak, meminta kepada masyarakat khususnya wilayah yang ada di kawasan rawan bencana 3 lereng merapi yaitu 3 desa, desa tegalmulyo, desa sidoredjo dan desa balerante. Pola evakuasinya dilakukan secara mandiri artinya masyarakat dengan segala kesadarannya yang sudah sangat tinggi kemudian dengan dukungan sarana, prasarana dan transportasinya. Sebagaimana diketahui diatas itu yaitu sudah tersedia armada truk, kendaraan roda 4 bahkan ratusan dan itu sangat sangat memungkinkan malah sudah berlebih artinya penduduk yang harus turun mengevakuasi diri secara mandiri.

5. Dan lainnya yang ke lima yaitu sektor keamanan, hal ini tentu di koordinasikan oleh polres kab.klaten. namun dalam pelaksanaannya dibantu oleh kodim, satpol pp, hansip dan ormas mereka saling membantu sama lain dalam melindungi masyarakat serta membantu masyarakat. Contoh melindungi dan membantu masyarakat adalah mereka mengamankan

proses perjalanan evakuasi yang dilakukan masyarakat, membantu melindungi barang berharga masyarakat dan lainnya. Polres pun mereka harus melakukan koordinasi dengan BPBD, karena BPBD yang berwenang dalam urusan kebencanaan.

6. Yang ke enam yaitu sektor barak, sektor ini di koordinasikan oleh dinas pekerja umum. Jadi mereka menyiapkan barak pengungsian yang dimana barak shelter tersebut bersifat permanen. Selain itu juga mereka mempersiapkan atau memastikan jalan jalur menuju barak baik dan tidak adak bolong maupun bergelombang jalan tersebut.

Untuk lokasi shelter barak sendiri yang mana sektor barak yang ada di kabupaten klaten ini ada 3 desa kawan rawan bencana klaten, yang sebelah timur itu namanya desa tegalmulyo, desa tegal mulyo ini diarahkan untuk nanti ke shelter kebarak pengungsian di desa demak hijau kecamatan ngarangnongko, kemudian desa sidorejo itu posisi desa yg di tengah itu diarahkan nanti ke barak di desa menden kecamatan kebonarum, kemudian berikutnya yang paling barat itu perbatasan dengan kabupaten sleman yaitu desa balerante. ketiga desa itu semuanya di kecamatan kemalang, desa balerante nanti masyarakatnya akan diarahkan ke shelter barak pengungsian di desa kebondalemalor kecamatan prambanan, jadi artinya semua sudah terencana.

7. Selanjutnya yang ke tujuh yaitu sektor dapur umum, sektor tersebut di koordinasikan oleh BPBD Kab.klaten serta dibantu oleh swasta seperti ormas-ormas yang berada di kab.klaten. Dapur umum ini penting karena hak dasar bagi pengungsi dalam urusan perut. sektor barak dapur umum saat proses pengungsian di barak-barak pengungsian itu nanti akan otomatis di jamin, di layani untuk pemenuhan hak-hak dasar makan.

Yang jelas makanan itu oleh sektor dapur umum yang mana dapur umum ini sementara akan di laksanakan oleh 3 lembaga. Yang tadi shelter atau barak pengungsian di desa yang di desa demakijo kecamatan karangnoko nanti akan dilaksanakan oleh pmi cabang klaten, otomatis pmi ini akan menggandeng koleganya di soloraya. Kemudian di shelter barak pengungsian yang desa menden kecamatan kebonarum ini nanti dapur

umumnya dilaksanakan oleh lembaga penanggulangan bencana muhammadiyah kabupaten klaten, otomatis dengan koleganya lembaga penanggulangan bencana muhamdiah se soloraya. kemudian di barak atau pengunsian di desa kebon dalemlor itu nanti dapur umum akan di koordinasikan oleh tagana taruna siaga bencana yang mana itu anak binaan bina sosial nah itu sektor dapur umum.

8. Sektor yang ke delapan yaitu sektor komunikasi, hal ini di koordinasikan oleh dinas komunikasi dan informasi kabupaten klaten. Dalam seputar komunikasi kepada masyarakat klaten ini terkoneksi langsung dengan pusdalops BPBD dan BPPTG. Dalam artian dinas komunikasi dan informasi ini sebagai penyalur lagi informasi pusdalops dan BPPTG ke masyarakat. Dalam penyebarannya mengerahkan media massa maupun media sosial, hal tersebut untuk memastikan tersampaikan informasi kebencanaan ke masyarakat. Namun dalam pelaksanaan di lapangan komando utama di pegang langsung oleh BPBD Kab.Klaten.

9. Sektor ke sembilan yaitu sektor ekonomi, hal tersebut di koordinasikan oleh dinas pertanian. Sektor ekonomi jadi diperhatikan oleh pemerintah sebab salah satu faktor menghambat evakuasi adalah masyarakat yang tidak mau ternak nya tidak dibawa evakuasi juga. Ternak tersebut juga merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat

Hewan ternak yang di miliki masyarakat tersebut adalah sapi dan kambing. Jadi pada saat evakuasi BPBD sudah menyediakan kandang-kandang sementara yang di mana itu dibangun berdekatan dengan shelter atau barak pengunsian

10. Yang terakhir yang ke sepuluh yaitu sektor logistik, hal ini di koordinasikan oleh BPBD sendiri. terutama bidang kesiapsiagaan dan logistik disini mereka menyiapkan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik seperti pedoman teknisnya, pelaksanaan kebijakannya, bekerjasama dengan bidang logistik, laporan, bahan evaluasi dan lainnya yang berkaitan dengan logistik.

Untuk upaya pengorganisasian berjalan adalah dengan faktor komunikasi yang berperan yaitu sebagai komunikator dan komunikan bagi pelaksana penanganan bencana dan masyarakat

sesuai dengan perannya dalam kegiatan penanganan bencana. Perubahan karakteristik personal dan perilaku komunikasi pemuka pendapat memiliki banyak peubah yang tidak berpengaruh nyata. (Badri, M, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, No. 1, Februari 2008: 55-71).

#### **4. Evaluasi dan Koordinasi BPBD Kab.Klaten dalam Penanganan Bencana**

Dalam melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi BPBD Kab.Klaten membuat laporan yang namanya jitupasna. Jitupasna ini dilaksanakan oleh kabid 3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. laporan tersebut berupa menghitung kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh bencana terjadi. Dari sisi masyarakat yang terdampak melingkupi korban meninggal, korban luka berat dan ringan. Serta tidak hanya itu saja jitupasna ini menghitung area yang terdampak melingkupi infrastruktur umum, sekolah, rumah dan lain-lain. Selain itu menyelidiki bagaimana bencana tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana proses terjadi bencana tersebut secara ilmiah.

Kabid 3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini tentu tidak sendiri melaksanakan laporan jitupasna tersebut karena dibantu dengan kabid 1 dan kabid 2 serta koordinasi dengan mitra-mitra BPBD Kab.Klaten seperti relawan-relawan, Polisi,TNI, SAR dan lainnya.

Tidak hanya itu saja kabid 3 membuat yang namanya rencana aksi atau disingkat renaksi. Renaksi ini menyusun pemulihan dan pembangunan bertahap 3 sampai 4 tahun kedepan dari pasca bencana yang terjadi. Melingkupi pemulihan healing atau trauma, sosial, ekonomi masyarakat terdampak maupun infrastruktur umum dan rumah masyarakat. hal ini di koordinasikan dengan kepala BPBD lalu disalurkan ke pusat yaitu BNPB.

Untuk pemulihan healing atau trauma masyarakat, BPBD menerima bantuan bekerjasama dengan organisasi NGO dan lainnya yang merupakan spesialisasinya. Jadi peneliti mendapati dari data bahwa setiap bantuan yang masuk dari luar mereka wajib

berkoordinasi dengan BPBD Kab.Klaten untuk dicatat diijinkan atau tidak karena BPBD Kab.Klaten sebagai komando utama penanganan bencana.

## B. Analisis SWOT

Pada pembahasan ini peneliti akan menganalisa kelebihan dan kekurangan manajemen komunikasi BPBD Kab. Klaten dalam penanganan bencana yaitu dengan Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat atau disebut dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu formula strategi yang biasanya digunakan oleh perusahaan maupun organisasi dalam menentukan langkah-langkah seperti apa yang akan di pakai untuk kedepan. Dalam menganalisis ini biasanya mereka melihat berbagai faktor yang sekiranya dapat dijadikan bahan lalu diidentifikasi secara sistematis dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Seperti halnya menurut Freddy Rangkuti (2001:18-19) mengatakan bahwa, analisis SWOT dalam menentukan strategi perusahaan maupun organisasi mereka akan mengidentifikasi dari berbagai faktor secara sistematis lalu didasarkan pada pemikiran secara logika yang memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (Opportunities), namun di satu sisi akan dampak meminimalkan kelemahan (weakness) serta ancaman (Threats).

Dan dibawah ini peneliti akan menjelaskan analisa tabel dan analisis SWOT kelemahan dan kelebihan dari BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana setelah mendapati data yang di dapat :

Strength (S)	Weakness (W)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemimpin sebagai pilar utama dengan ketua BPBD Kab.Klaten di pimpin oleh sekretaris daerah Kabupaten Klaten dan ini mempermudah koordinasi dengan stakeholder untuk penanganan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki Manajemen komunikasi yang baik dalam sarana informasi publik seperti :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Website resmi BPBD Kab.Klaten tidak menyajikan informasi yang lengkap.</li> <li>Media sosial seperti</li> </ol> </li> </ul>

<p>bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki tim reaksi cepat yang bekerja dalam 24 jam</li> <li>• Memiliki radio repiter dan media whatsapp sebagai media komunikasi dengan relawan atau stakeholder terkait</li> <li>• Program pembinaan masyarakat dalam penanganan bencana</li> <li>• Pusdalops pusat pengendalian operasional dengan di dukung peralatan teknologi canggih ini menyimpan data dan informasi kebencanaan di Wilayah Kabupaten Klaten</li> </ul>	<p>Instagram dan Facebook mereka tidak memiliki akun resmi. Hanya memiliki akun resmi twitter</p>
<p><b>Opportunities (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan memanfaatkan media komunikasi teknologi canggih seperti memperbaiki website resmi BPBD dan media sosial.</li> </ul>	<p><b>Threats (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat sering kali berspekulasi sendiri status bencana gunung merapi tanpa konfirmasi ke pihak yang berwenang seperti BPPTG dan BPBD</li> <li>• Karena penyaluran informasi sudah canggih dan cepat dapat penyebaran informasi hoax bencana terjadi di masyarakat</li> </ul>

Tabel 4.1 Analisa SWOT Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Dalam penanganan Bencana

Analisa tersebut peneliti dapati dari hasil data yang di dapat dari ketiga narasumber. Lalu dari data tersebut peneliti mengolah dan analisis menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari penanganan bencana di Kabupaten Klaten oleh BPBD Kab.Klaten.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Manajemen Komunikasi BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana

Berdasarkan pembahasan sebelumnya peneliti akan membuat kesimpulan dari hal tersebut, maka ditarik kesimpulannya adalah manajemen komunikasi BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana peneliti memadukan dengan kerangka konsep dari (Lestari, 2006 :199) bahwa dalam manajemen komunikasi bencana harus memiliki kepemimpinan dalam pengendalian bencana lalu kepemimpinan ini dapat merencanakan perencanaan dan evaluasi dengan koordinasi. Di dalam perencanaan sendiri harus menghasilkan sebuah efektivitas, sumber daya dan penanggulangan bencana seperti apa. Untuk menjalankan tersebut dibutuhkan adanya pengorganisasian dan membutuhkan mitra dalam kerja sama merelasasikan perencanaan tersebut. Dari sesudah kerja perencanaan tersebut akan dibutuhkan sebuah evaluasi serta dibarengi dengan koordinasi stakeholder.

Adapun berdasarkan konsep manajemen komunikasi bencana untuk rumusan masalah yang pertama, dan sebagai berikut kesimpulan yang sudah peneliti ambil :

1. Yang pertama adalah kepemimpinan pengendalian bencana dan BPBD memiliki itu dengan menempatkan pemimpin sebagai pilar utama. karena pemimpin pelaksanaan dipimpin oleh sekretaris daerah Klaten. Bahkan hal tersebut sudah menjadi peraturan daerah, alesannya antara lain adalah sekretaris daerah ini memiliki power atau koneksi dengan berbagai instansi pemerintah maupun berbagai kalangan masyarakat. Power inilah digunakan dalam mempermudah koordinasi dengan instansi daerah dan



masyarakat sipil. Pemimpin BPBD Kab.Klaten juga membuat perencanaan penanganan bencana maupun evaluasi pasca bencana serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

2. Perencanaan disini BPBD memiliki beberapa program yang di peruntukan pada masa normal dan masa tanggap darurat. Pada masa normal contohnya BPBD Kab.Klaten memiliki beberapa program pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Seperti program sekolah sungai, desa tangguh (destana), desa bersaudara, palatihan mitigasi, (ULD) unit layanan disabilitas. Pada masa tanggap darurat BPBD Kab.Klaten memiliki pusat sarana informasi kebencanaan jadi disini juga mereka dapat berkoordinasi dengan stakeholder. Selain itu mereka memiliki tim reaksi cepat yang dimana mereka siap siaga selama 24 jam dalam memantau bencana di wilaya Kabupaten Klaten.

3. Pengorganizing dan kerja sama mitra, disini menjelaskan bahwa BPBD Kab.Klaten bahwa mereka mempunyai struktur organisasi dan tugas bidangnya masing-masing yang jelas. Lalu mereka memiliki mitra relawan non pemerintah maupun dari badan pemerintah daerah. BPBD Kab.Klaten dalam setiap 3 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan para relawan ini dan badan pemerintah dalam menyamakan satu visi dan satu misi penanganan bencana.

4. Evaluasi dan koordinasi, BPBD Kab.Klaten membuat suatu laporan data yang dimana laporan tersebut menghitung kerugian yang terjadi sesudah bencana. Laporan ini dinamai jitupasna yang dimana membuat laporan tersebut berkoordinasi bersama dengan stakeholder lainnya. dari laporan tersebut jadi bahan evaluasi yang mana akan jadi acuan dalam membuat perencanaan renaksi. Renaksi rencana aksi ini adalah perencanaan pembangunan wilayah yang terkena bencana selama beberapa tahun ke depan.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Untuk menjawab kesimpulan nomer dua yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana peneliti akan mulai dari faktor pendukung. Disini ada beberapa faktor pendukung BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana :

1. pertama BPBD Kab.Klaten sebagai komando utama dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Klaten dengan di pimpin oleh sekretaris daerah ini membuat koordinasi penanganan bencana dengan stakeholder akan mudah.
2. Mereka memiliki program pembinaan masyarakat dalam membantu penanganan bencana secara mandiri sebelum BPBD datang membantu.
3. Lainnya adalah mereka memiliki Pusdalops yang dimana pusat pengendalian operasional ini membantu sekali dalam berkoordinasi dengan stakeholder terkait serta memiliki data informasi bencana di wilayah klaten.
4. Memiliki tim reaksi cepat yang dimana mereka bekerja selama 24 jam untuk memantau bencana di wilayah Kabupaten Klaten.
5. Menggunakan alat radio repiter (HT) dan media komunikasi Whatsapp sebagai koordinasi dalam keadaan bencana.

Untuk faktor penghambat peneliti melihat BPBD Kab.Klaten tidak memanfaatkan secara dalam dari sisi media komunikasi seperti website dan media sosial yang kurang menarik. Padahal ini bisa di dimanfaatkan betul dalam mendekatkan diri BPBD terhadap masyarakat klaten seputar informasi kebencanaan dan lainnya. penghambat lainnya adalah di masyarakat sendiri sering berspekulasi sendiri menentukan status bencana gunung merapi tanpa konfirmasi ke pihak berwenang seperti BPPTG dan BPBD. Dengan teknologi media yang canggih dan penyebaran informasi pesat ini dapat menyebabkan beredar informasi bencana hoax di masyarakat.

## B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian mengenai manajemen komunikasi BPBD Kab.Klaten dalam penanganan bencana peneliti mendapati beberapa keterbatasan dalam penelitian ini seperti hanya mengambil satu sudut objek saja dari pihak BPBD Kab.klaten. Maka dari itu peneliti dari hasil penelitian ini bisa dilanjutkan dengan peneliti lain dengan menambah dari sudut lain tentang penanganan bencana. Berikut keterbatasan peneliti :

- a. Kurangnya pra-riset peneliti dalam pengetahuan manajemen komunikasi bencana selain itu hanya ada satu buku acuan peneliti yaitu komunikasi bencana. Maka dari itu pra-riset peneliti kurang maksimal.
- b. Pengambilan data masih kurang dan waktu wawancara yaitu hanya sebanyak tiga kali pertemuan dengan berbeda orang, bersama staff ibu Asri Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, Kabid. Kedaruratan Bapak Sri Yuwono Haris dan Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bapak Ahmad Wahyudi. Selebihnya melakukan observasi sendiri. Peneliti merasa tiga kali pertemuan dengan narasumber adalah waktu yang sangat minim untuk menggali informasi.
- c. Untuk data peta sebaran rawan bencana peneliti tidak mendapati sehingga peneliti tidak dapat sepenuhnya memeriksa semua jenis bencana yang ada di Kab.Klaten. Peneliti hanya memeriksa garis besar standar manajemen komunikasi penanganan bencana.

## C. Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BPBD Kab.Klaten sebagai komando penanganan bencana di daerah Kab.Klaten hal yang utama harus di perhatikan adalah dari sisi manajemen komunikasi media yang harus lebih di tingkatkan lagi. Peneliti mendapati bahwa media website resmi BPBD Kab.Klaten masih kurang menyajikan informasi yang lengkap seputar BPBD sendiri dan desain kemasan website sendiri masih kurang bagus untuk di kunjungi masyarakat klaten.
2. Untuk menambah penyaluran media informasi bencana, BPBD Kab.Klaten memiliki akun resmi di media Twitter. Namun di media sosial lainnya peneliti tidak mendapati akun resmi di media Instagram maupun Facebook. Oleh karena itu untuk menambah sasaran masyarakat yang lebih luas BPBD Kab. Klaten bisa menambah akun media tersebut, karena tidak semua masyarakat klaten menggunakan media Twitter.
3. Melakukan penelitian dengan tema serupa peneliti menyarankan untuk melakukan pra-riset guna melihat atau memastikan fakta fakta, yang fungsinya untuk memudahkan calon peneliti melihat masalah. Selanjutnya, apabila hendak melakukan penelitian serupa peneliti merekomendasikan untuk membaca banyak buku mengenai komunikasi bencana, prosedur penanganan bencana, strategi penangan bencana serta surat kabar atau berita online yang berkaitan dengan objek penelitian. Terakhir, peneliti menyarankan untuk dilakukan lebih banyak penelitian komunikasi di bidang bencana terutama pemanfaatan new media.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idrus, Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Gulo, w. (2002). Metodologi penelitian. Jakarta: Grasindo.
- Muhammad, Arni. (2005). Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanto, Harry Eko, et.al. (2011). *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta: Aspikom.
- Sanityastuti, Sri Marfuah. (1997). Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Vardiansyah, Dani. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, Freddy. (2001). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Richard L. Daft. (2010). Era Baru Manajemen, Edward Tanujaya, Edisi 9, Salemba Empat

Sumber Web :

<https://www.bnppb.go.id/home/definisi> (diakses jam 01.10, 08/06/2017)

<https://www.unisdr.org/we/inform/terminology> (diakses jam 01.15, 08/06/2017)

[http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-bencana/335 menuai-bencana-berkelanjutan-di-aceh-1](http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-bencana/335%20menuai-bencana-berkelanjutan-di-aceh-1) (diakses jam 02.22, 25/07/2017)

<http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-masyarakat-dalam-pandangan.html>, (diakses pada jam 22.53, 24/07/2017)

[http://bpbd.klatenkab.go.id/home/?page\\_id=708](http://bpbd.klatenkab.go.id/home/?page_id=708), (diakses pada tanggal 23 april 2018, pukul 13.47 WIB)

<https://www.bnpb.go.id/bnpb-resmikan-pusat-pengendalian-operasi-bpbd-klaten-dan-boyolali>, (diakses pada tanggal 22 april 2018, pukul 20.56 WIB)

<https://elshint.com/news/1269/2015/01/23/bpbd-klaten-awasi-daerah-rawan-bencana>, (diakses pada tanggal 22 april 2018, pukul 14.31 WIB)

(<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49630216>, (diakses pada tanggal 26 November 2019, pukul 16.13.WIB)

Sumber Jurnal :

Arimastuti, Arandita. "Tahapan Proses Komunikasi Fasilitator Dalam Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana," Jurnal Penanggulangan Bencana, Volume 2 nomer 2 (2011), hal. 15-23.

Asteria, Dona. "Optimalisasi Komunikasi Bencana di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana," Jurnal Komunikasi, Volume 01 (2016), hal. 1-11.

Badri, M. "Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul)," Jurnal Komunikasi Pembangunan, Volume 06 Nomer 1 (Februari, 2008), hal. 55-71.

Wahyudi, Firman. "Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan

Menanggulangi Bencana Asap Di Riau," JOM FISIP, Volume 3 No.2 (Oktober, 2016), hal. 1-15.

Zulfika, Teuku Muhammad. 2011. Menuai Bencana Berkelanjutan di Aceh. Suprpto. "Statistik Pemodelan Bencana Banjir Indonesia (Kejadian 2002-2010)," Jurnal Penanggulangan Bencana, Volume 2 nomor 2 (2011), hal. 34-47.



# LAMPIRAN







Foto bersama dengan Kabid. Kedaruratan dan Logistik  
Bapak Sri Yuwono Haris



Foto bersama dengan Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
Bapak Ahmad Wahyudi



Foto kendaraan BPBD Kab.Klaten